



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN II | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau

Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	a. Fiky Rahman, ST	Penata Layanan Operasional		
		b. Aulia Devi Kirana, S.Pd	Penyusun Rencana & Pelaporan		
2.	Diperiksa	Taufiq Hidayat, SE., M.MTr	Kepala Subbagian Tata Usaha		
3.	Disetujui	Taufiq Hidayat, SE., M.MTr	Kepala Subbagian Tata Usaha		
4.	Disetujui	Muhammadun, S.M	Kepala Seksi Sarana & Angkutan Jalan, Sungai, dan Penyeberangan		
5.	Disetujui	Yuliansyah, S.SiT., M.M	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan		
6.	Disetujui	Allumni Mulki, S.SiT., M.Sc	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		

Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi

Bab I Pendahuluan

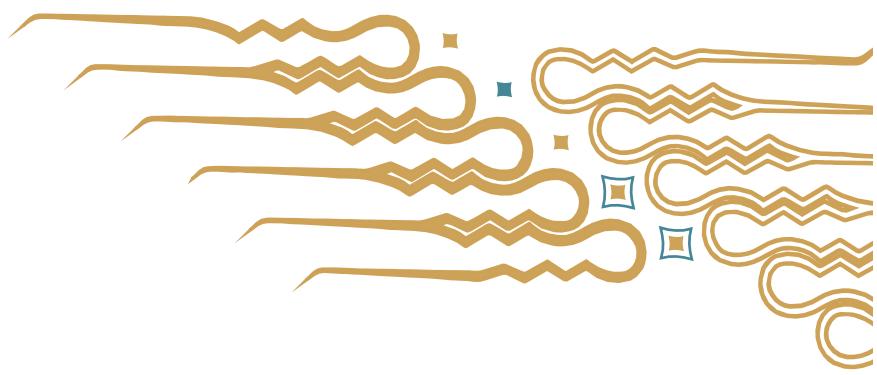
I.1 Latar Belakang	I-3
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
I.3 Sumber Daya Manusia	I-7
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-8
I.5 Sistematika Laporan	I-10
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-11
I.7 Uraian Singkat Perjanjian Kinerja Tahun 2025	I-13
I.8 Uraian Singkat Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	I-16

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	II-2
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	II-3
II.3 Realisasi Anggaran	II-97

Bab III Penutup

III.1 Ringkasan Capaian	III-3
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	III-5



Daftar

Tabel

Tabel	I.1	Data Jumlah Pegawai Balai Transportasi Darat Kelas II Riau Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029	I-7
Tabel	I.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	I-13
Tabel	I.4	Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2025	I-14
Tabel	I.5	Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	I-16
Tabel	II.1	Capaian IKK dan SK Triwulan II Tahun 2025	II-5
Tabel	II.3	Capaian IKK dan SK Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	II-10
Tabel	II.4	Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Riau TA. 2025 Capaian IKK dan SK Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar	II-11
Tabel	II.5	kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	II-13
Tabel	II.6	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	II-16
Tabel	II.7	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	II-21
Tabel	II.8	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	II-33
Tabel	II.9	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	II-38
Tabel	II.10	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	II-52
Tabel	II.11	Capaian IKK dan SK Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	II-58
Tabel	II.12	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	II-63
Tabel	II.13	Capaian IKK dan SK Meningkatnya Layanan Perkantoran	II-68
Tabel	II.14	Perbandingan Pagu & Realisasi	II-97
Tabel	II.15	Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Pada Periode Triwulan II TA. 2025	II-98
Tabel	II.16	Efisiensi Anggaran	II-99
Tabel	III.1	Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab	III-5

Daftar

Gambar

Gambar	II.1	Realisasi IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	II-11
Gambar	II.2	Realisasi IKK Monitoring & Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe-A	II-14
Gambar	II.3	Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	II-17
Gambar	II.4	Realisasi IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	II-19
Gambar	II.5	Realisasi IKK Jumlah Terminal tipe A yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	II-22
Gambar	II.6	Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	II-27
Gambar	II.7	Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM	II-29
Gambar	II.8	Realisasi IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	II-31
Gambar	II.9	Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	II-34
Gambar	II.10	Realisasi IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	II-36
Gambar	II.11	Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	II-39
Gambar	II.12	Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum	II-41
Gambar	II.13	Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	II-43
Gambar	II.14	Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	II-46
Gambar	II.15	Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	II-48
Gambar	II.16	Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	II-50
Gambar	II.17	Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman	II-53

Gambar	II.18	Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	II-56
Gambar	II.19	Realisasi IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis	II-59
Gambar	II.20	Realisasi IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman	II-61
Gambar	II.21	Realisasi IKK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	II-64
Gambar	II.22	Realisasi IKK Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	II-66
Gambar	II.23	Realisasi IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	II-70
Gambar	II.24	Realisasi IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	II-73
Gambar	II.25	Realisasi IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	II-75
Gambar	II.26	Realisasi IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	II-77
Gambar	II.27	Realisasi IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	II-79
Gambar	II.28	Realisasi IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	II-81
Gambar	II.29	Realisasi IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	II-83
Gambar	II.30	Realisasi IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	II-86
Gambar	II.31	Realisasi IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	II-88
Gambar	II.32	Realisasi IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	II-90
Gambar	II.33	Realisasi IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	II-92
Gambar	II.34	Realisasi IKK Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum	II-94

Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** IKU Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 2.** Revisi I IKU Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 3.** SK IKK BPTD Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 4.** Renja-RKT Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 5.** Revisi Renja-RKT Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 6.** PK Kabalai Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 7.** Revisi I PK Kabalai Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 8.** PK Kasubbag TU Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 9.** Revisi I PK Kasubbag TU Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 10.** PK Kasi PJSDP Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 11.** Revisi I PK Kasi PJSDP Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 12.** PK Kasi SAJSDP Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 13.** Revisi I PK Kasi SAJSDP Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 14.** PK Kasi LLJSDPP Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 15.** Revisi I PK Kasi LLJSDPP Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 16.** Renaksi Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 17.** Revisi I Renaksi Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 18.** Monitoring Renaksi 2025
- Lampiran 19.** SK Dirjen Hubdat-Penetapan Lintas Penyeberangan 2025
- Lampiran 20.** SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis 2025
- Lampiran 21.** Dokumen Lainnya



• KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengembangkan amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Pekanbaru, 11 Juli 2025





• RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming memulai kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025- 2029 mengusung Visi "Asta Cita". Asta Cita yang dimaksud dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sudah cukup baik. Dari 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Triwulan II tahun 2025, terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKK} < 100\%$).

Dari 34 (Tiga Puluh Empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Triwulan II Tahun 2025, terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\text{IKK} \geq 100\%$) dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKK} < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebanyak 9 trayek (target 9 trayek) tercapai 100%;
2. Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
3. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
4. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebanyak 2 trayek (target 2 trayek) tercapai 100%;
5. Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebanyak 0 unit (target 1 unit) tercapai 0%;
6. Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi sebanyak 3 lokasi (target 3 lokasi) tercapai 100%;

7. Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM terealisasi sebanyak 3 lokasi (target 3 lokasi) tercapai 100%;
8. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
9. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebanyak 2 lokasi (target 9 lokasi) tercapai 22%;
10. Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebanyak 2 lokasi (target 28 lokasi) tercapai 7%;
11. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
12. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang dan penegakkan hukum terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
13. Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
14. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
15. Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
16. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
17. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
18. Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
19. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi sebanyak 0 unit (target 1.378 unit) tercapai 0%;
20. Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi sebanyak 0 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 0%;
21. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 orang (target 200 orang) tercapai 0%;
22. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LL AJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 orang (target 200 orang) tercapai 0%;
23. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 4 kegiatan) tercapai 50%;
24. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 18 dokumen (target 34 dokumen) tercapai 52,94%;
25. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebanyak 8 kegiatan (target 15 kegiatan) tercapai 53,33%;
26. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 5 kegiatan (target 10 kegiatan) tercapai 50%;
27. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebanyak 0 dokumen (target 2 dokumen) tercapai 0%;
28. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 137 kegiatan (target 270 kegiatan) tercapai 50,74%;

29. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
30. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebanyak 4 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 66,67%;
31. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
32. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 0%;
33. Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
34. Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi hukum terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 30,83%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan adanya arahan untuk efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang masih belum mulai dilaksanakan, seluruh instansi yang ada masih menunggu arahan lanjutan terkait penggunaan anggaran yang sementara ini masih di *hold* pada sistem di Kementerian Keuangan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaranya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbang kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danai, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbang kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danai, penyeberangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi BPTD Tipe-A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU



KEPALA BALAI
MUTTAQIN, ST., M.MTr
NIP. 19691226 1997031 002



KASUBBAG TATA USAHA
TAUFIQ HIDAYAT, SE., M.MTr
NIP. 19801209 2005021 001



KEPALA SEKSI SAJSDP
MUHAMMADUN, A.Md.LLAJ., S.M
NIP. 19771103 2002121 008



KEPALA SEKSI PJSDP
ALUMNI MULKI, S.SiT., M.Sc
NIP. 19830817 2005011 003



KEPALA SEKSI LLJSDP & PENGAWASAN
YULIANSYAH, S.SiT., M.M
NIP. 19800713 2001121 002

SATUAN PELAYANA TERMINAL TIPE A

TERMINAL TIPE A BRPS PEKANBARU
TERMINAL TIPE A DUMAI
TERMINAL TIPE A BANGKINANG

SATUAN PELAYANAN UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

UPPKB BALAI RAJA
UPPKB MUARA LEMBU
UPPKB TENAYAN RAYA
UPPKB RANTAU BERANGIN

SATUAN PELAYANAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI
PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN
PELABUHAN SUNGAI DUKU
PELABUHAN SUNGAI TEBILAHAN

JABATAN FUNGSIONAL

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki tugas melaksanakan pembangunan, pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraaan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta beantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyedia, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai, danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karosari, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal, sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, menegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta patrol dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menaungi sebanyak 409 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Balai Transportasi Darat Kelas II Riau

NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK 2023	PPPK Tahap 1	PPPK Tahap 2	Outsourcing	SUB TOTAL
1	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	13	1	-	18	10	6	48
3	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau Penyeberangan	9	1	-	6	-	2	18
4	Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	11	-	-	11	-	3	25
5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	11	-	-	20	-	-	31
6	Terminal Tipe-A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), Kota Pekanbaru	11	-	-	48	7	2	68
7	Terminal Tipe-A Dumai, Kota Dumai	4	2	1	26	1	-	34
8	Terminal Tipe-A Bangkinang, Kab. Kampar	6	2	-	19	2	-	29
9	UPPKB Balai Raja, Kab. Bengkalis	4	1	-	16	-	-	21
10	UPPKB Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi	5	1	-	17	2	-	25
11	UPPKB Rantau Berangin, Kab. Kampar	-	-	-	-	1	2	3
12	UPPKB Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	11	2	1	9	4	-	27
13	Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan (BSJ), Kota Dumai	10	2	-	27	-	-	39
14	Pelabuhan Penyeberangan Tj. Buton Mengkapan, Kab. Siak	5	5	-	14	-	2	26
15	Pelabuhan Sungai Sungai Duku, Kota Pekanbaru	5	-	-	8	-	-	13
16	Pelabuhan Sungai Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir	1	1	-	7	-	2	11
TOTAL		107	18	2	246	27	19	419

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3) PM No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim;
- c. Penyesuaian nomenklatur dan wewenang organisasi di beberapa matra perhubungan.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPTD dan Satuan Pelayanan). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat Satuan Pelayanan yang belum memenuhi standar jumlah pegawai dalam menjalankan tupoksi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. IM 9 Tahun 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
4. Pengoperasian Terminal Penumpang;
5. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
6. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
7. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
8. ODOL (*Over Dimention Over Loading*);
9. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
10. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta;
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- I.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- I.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
- II.3 Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- III.1 Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indeks Kinerja Utama Tahun 2025
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kabalai 2025
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kasubbag TU 2025
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Kasi SPTJ 2025
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Kasi LLAJ 2025
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja TSDKP 2025
- Lampiran 8. Rencana Aksi 2025
- Lampiran 9. Monitoring Renaksi 2025
- Lampiran 10. SK Dirjen Hubdat tentang Penetapan Lintas Penyeberangan 2025
- Lampiran 11. SK Dirjen Hubdat tentang Trayek Angkutan Jalan Perintis 2025
- Lampiran 12. Dokumen Lainnya

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

I.6.1. Uraian Singkat Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Lokasi	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

I.7. Uraian Singkat Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 130.466.736.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Lokasi	90
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET 2025
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Perhubungan Darat	Ditjen	Nilai	100

Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2025	TARGET PK 2025
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%		100
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi		3
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%		100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi		37
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%		100
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%		50
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%		100
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Lokasi		90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2025	TARGET PK 2025
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%		1
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang		200
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%		68
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi		1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai		90
5	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai		100

I.8. Uraian Singkat Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dikarenakan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Kementerian Perhubungan dan juga Rencana Strategis 2025-2029 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat banyak perubahan terhadap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, dalam hal ini Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 130.466.736.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target
	(1)	(2)			
1	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9
2	SK3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & Kl), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	1
3	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
			IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	2
4	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	3
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM	Lokasi	3
		IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2
5	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	9
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	28
6	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	1
		IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang dan penegakkan hukum	Kegiatan	1
		IKK 9.3 Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1
		IKK 9.4 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	1
		IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
		IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	1
8	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	1378
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4
9	SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200
10	SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4
		IKK 14.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	34
		IKK 14.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	15

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		IKK 14.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10
		IKK 14.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK 14.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	270
		IKK 14.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK 14.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	6
		IKK 14.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2
		IKK 14.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2
		IKK 14.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1
		IKK 14.12 Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi hukum	Kegiatan	1



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab II

Akuntabilitas Kinerja

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun Triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kegiatan Tahun 2025.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja.

Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau maka rata-rata capaian dari seluruh Sasaran Kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Capaian IKK dan SK Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			Tw II	Tw II	Tw II
				T	R	C			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan					100%			64.21%
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9	9	9	100%	Rp 3,546,660,500	Rp 4,554,358,434	64.21%
SK 3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi					0%			9.25%
IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 515,155,500	Rp 95,308,179	9.25%
SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan					50%			33.70%
IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 6,372,024,500	Rp -	0%
IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2	2	2	100%	Rp 6,287,254,000	Rp 8,475,524,554	67.40%
SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					63%			23.57%
IKK 7.1	Jumlah Terminal Tipe A Yang Ditingkatkan Pelayanannya Untuk Memenuhi SPM	Unit	1	1	0	0%	Rp 5,500,000,000	Rp -	0%
IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	3	3	3	100%	Rp 3,573,549,500	Rp 4,312,790,890	60%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			Tw II	Tw II	Tw II
					T	R	C			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM	Lokasi	3	3	3	100%	Rp 1,743,289,000	Rp 892,351,263	26%	
IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	2	1	50%	Rp 1,001,702,000	Rp 167,455,122	8%	
SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP						14.68%			15.12%
IKK 8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	9	9	2	22%	Rp 1,049,345,000	Rp 584,749,645	28%	
IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	28	28	2	7%	Rp 954,000,000	Rp 45,518,880	2%	
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang						0%			5.56%
IKK9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 1,001,702,000	Rp 167,455,122	8.36%	
IKK 9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang dan penegakkan hukum	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 1,001,702,000	Rp 167,455,122	8.36%	
IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 515,155,500	Rp 95,308,179	9.25%	
IKK 9.4	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 486,546,500	Rp 72,146,943	7.41%	
IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 5,556,500,000	Rp -	0.00%	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			Tw II	Tw II	Tw II	
				T	R	C				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 1,845,131,000	Rp -	0.00%
SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety					50%				9.25%
IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	100%	Rp 515,155,500	Rp 95,308,179	9.25%
IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di daerah	Kegiatan	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 515,155,500	Rp 95,308,179	9.25%
SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan					0%				0.00%
IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	1378	1378	0	0%	Rp 6,039,528,500	Rp -	0.00%	
IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4	4	0	0%	Rp 756,500,000	Rp -	0.00%	
SK 12	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan					0%				0.00%
IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200	200	0	0%	Rp -	Rp -	0.00%	
IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	200	200	0	0%	Rp -	Rp -	0.00%	

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			Tw II	Tw II	Tw II
				T	R	C			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran					31.14%			18.98%
IKK 14.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	2	50%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%
IKK14.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	34	34	18	52.94%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%
IKK 14.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	15	15	8	53.33%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%
IKK 14.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10	10	5	50%	Rp 21,486,973,000	Rp 10,841,193,240	25.23%
IKK 14.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	2	0	0%	Rp 21,486,973,000	Rp 10,841,193,240	25.23%
IKK 14.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	270	270	137	50.74%	Rp 705,013,000	Rp 385,682,419	27.35%
IKK 14.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%
IKK 14.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	6	6	4	66.67%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%
IKK 14.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	2	1	50%	Rp 705,013,000	Rp 385,682,419	27.35%
IKK 14.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	0	0%	Rp 10,379,956,500	Rp 9,304,009,477	44.82%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			Tw II	Tw II	Tw II
				T	R	C			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
IKK 14.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%
IKK 14.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi hukum	Kegiatan	1	1	0	0%	Rp 453,001,500	Rp 100,682,419	11.11%

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan **30.83%**

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan **28.03%**

Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK \geq 100%)	5
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0% \leq IKK $<$ 100%)	29

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, berdasarkan perjanjian kinerja dari 34 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, terdapat 5 (lima) IKK berstatus hijau dan 29 (dua puluh sembilan) IKK berstatus merah.

Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

II.2.1. SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 1 (satu) IKK, yaitu:

1. IKK 2.1 : Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan,

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.3 Capaian IKK dan SK Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan					100%
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9	9	9	100%

II.2.1.1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 9 trayek jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 9 trayek maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.



Gambar II.1 Realisasi IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 5958 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubdat dengan nomor KP-DJPD Tahun 2024 tertuang jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagai berikut :

Tabel II. 4 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Riau TA. 2025

NO	RUTE TRAYEK	JARAK (Km)
1	Sungai Pagar – Gema (Kab. Kampar)	140
2	Minas – Tualang – Gasib - Siak Sri Indrapura – Bunga Raya – Sungai Apit – Mengkapan (Kab. Siak)	336
3	Bagan Siapiapi – Sinaboi	74
4	Siak – Sungai Mandau – Perawang	186
5	Bagan Batu – Tanjung Medan – Mahato	136
6	Siak – Koto Gasib – Lubuk Dalam – Kerinci Kanan	116

NO	RUTE TRAYEK	JARAK (Km)
7	Bagan Siapiapi – Pujud – Tanjung Medan	296
8	Bagan Batu – Simpang Kanan	66
9	Siak – Mengkapan – Tanjung Pal	230

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 9 trayek yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak Tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$IKK\ 2.1 = \text{Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan}$$

$$\text{Realisasi} = 9\ \text{Trayek}$$

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan II Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan Layanan Subsidi Transportasi

Angkutan Jalan memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 3.546.660.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 4.554.358.434,- atau mencapai 64,21%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia angkutan jalan perintis untuk selalu berupaya meningkatkan pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang belum memadai; dan
3. Melakukan monitoring secara berkala untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.2. SK3 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 1 (satu) IKK, yaitu:

1. IKK 3.1 : Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.5 Capaian IKK dan SK Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi				0%
IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	1	1	0
					0%

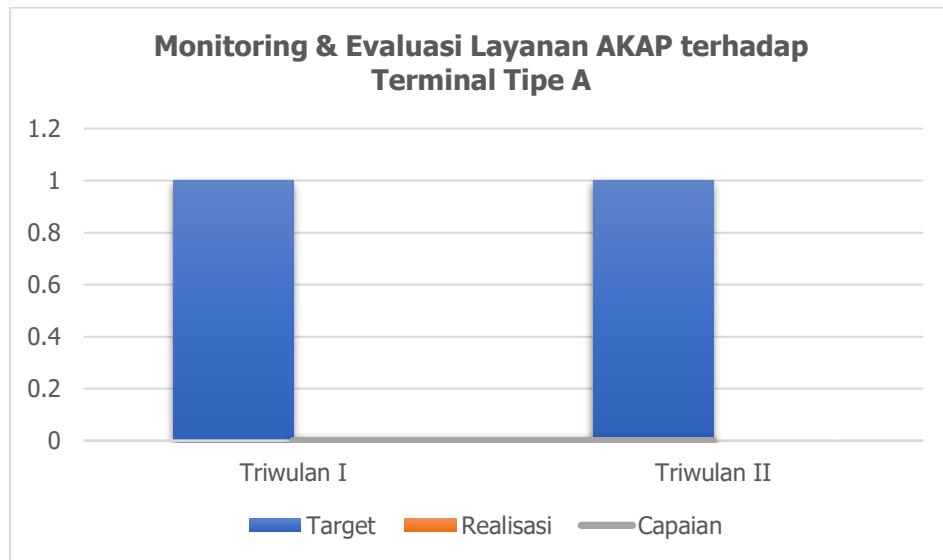
II.2.2.1. IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Setiap kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek memiliki standar-standar yang sesuai peraturan operasional, sehingga dibutuhkan pengawasan terkait hal-hal tersebut.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A.



Gambar II. 2 Realisasi IKK Monitoring & Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe-A

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
 - PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Persiapan rencana pelaksanaan akan disusun;
- Rencana akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- Mengajukan pergeseran anggaran jika tidak tersedia guna mendukung terlaksananya kegiatan.

❖ Faktor Kegagalan

- Ketersediaan anggaran menjadi penentu pelaksanaan kegiatan;
- Kegiatan fisik adalah kegiatan yang membutuhkan anggaran pelaksanaan untuk operasional;
- Pihak PO yang tidak kooperatif dikhawatirkan dapat menghambat rencana pelaksanaan pemeriksaan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 3.1 = Monitoring & Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A

Realisasi = 0 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Triwulan II Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 515.155.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 95.308.179,- atau mencapai 9,25%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan kegiatan yang belum terlaksana agar tersedia anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan;
2. Mengusulkan pembukaan blokir anggaran jika disetujui; dan

3. Mengusulkan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok dapat di anggarkan pada tahun-tahun selanjutnya agar dapat dilaksanakan setiap tahun.

II.2.3. SK5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 1 (satu) IKK, yaitu:

1. IKK 5 : Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas,
2. IKK 6 : Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.6 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK 5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan					50%
IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2	2	2	100%

II.2.3.1. IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

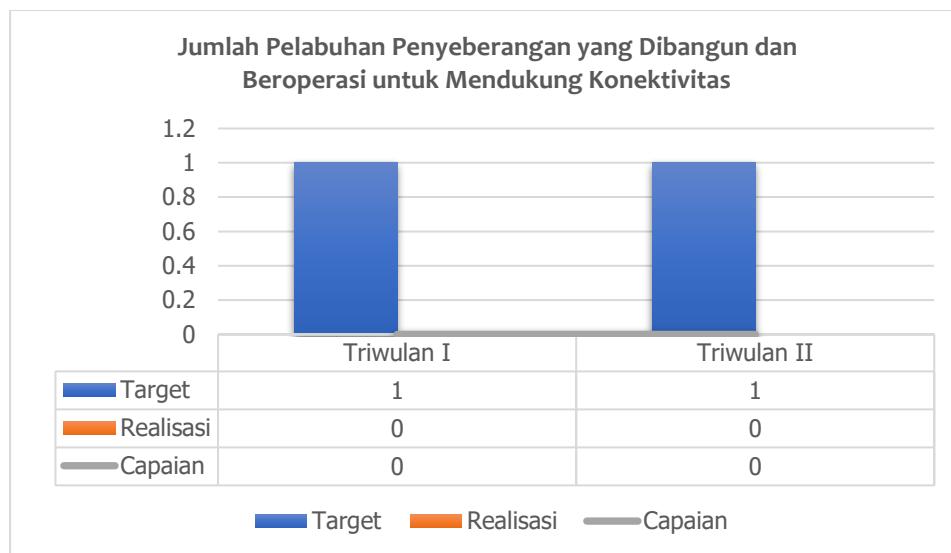
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika

dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas.



Gambar II.3 Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan pembangunan layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program

pengembangan dan peningkatan keberhasilan pembangunan pelabuhan penyeberangan;

- Ketersediaan anggaran yang mendukung untuk pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
- Dukungan dari para stakeholder untuk mendorong peningkatan SDM yang tersedia sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;

❖ Faktor Kegagalan

- Adanya Pejabat Pembuat Komitmen yang berkompeten terkait kegiatan infrastruktur atau prasarana terkhusus pembangunan pelabuhan;
- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
- Diblokirnya anggaran dan terlambatnya relaksasi anggaran terhadap anggaran yang diblokir.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 5 = Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

Realisasi = 0 Unit

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Triwulan II Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung Tahap 2 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 6.372.024.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan pengaturan dan pembinaan, pengawasan kegiatan Kepelabuhanan;
2. Melaksanakan evaluasi fasilitas pelabuhan;
3. Mengusulkan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung SPM di pelabuhan;

4. Peningkatan SDM dalam bidang pembinaan, pengawasan kegiatan Kepelabuhanan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan pelabuhan.

II.2.3.2. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 lintasan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 lintasan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.



Gambar II.4 Realisasi IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025;

- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4744/AP.204/DRJD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 5856/AP.204/DRJD/2018 tentang Perhitungan dan Prosedur Pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
- SOP berjalan dengan efektif dan efisien;
- Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.

❖ Faktor Kegagalan

- Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
- SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
- Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 5 = Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

Realisasi = 2 Lintasan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Triwulan II Tahun 2025 yaitu Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 6.287.254.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 8.475.524.554,- atau mencapai 67,4%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan operasional Pelabuhan SDP perintis yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP Perintis,
3. Mengusulkan pagu kebutuhan dengan optimal dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kegiatan layanan angkutan penyeberangan perintis.

II.2.4. SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 4 (empat) IKK, yaitu:

1. IKK 7.1 : Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM,
2. IKK 7.2 : Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM,
3. IKK 7.4 : Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM,
4. IKK 7.6 : Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.7 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK 7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					63%
IKK 7.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	0	0%
IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	3	3	3	100%
IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM	Lokasi	3	3	3	100%
IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	2	1	50%

II.2.4.1. IKK 7.1 Jumlah Terminal Tipe A yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM

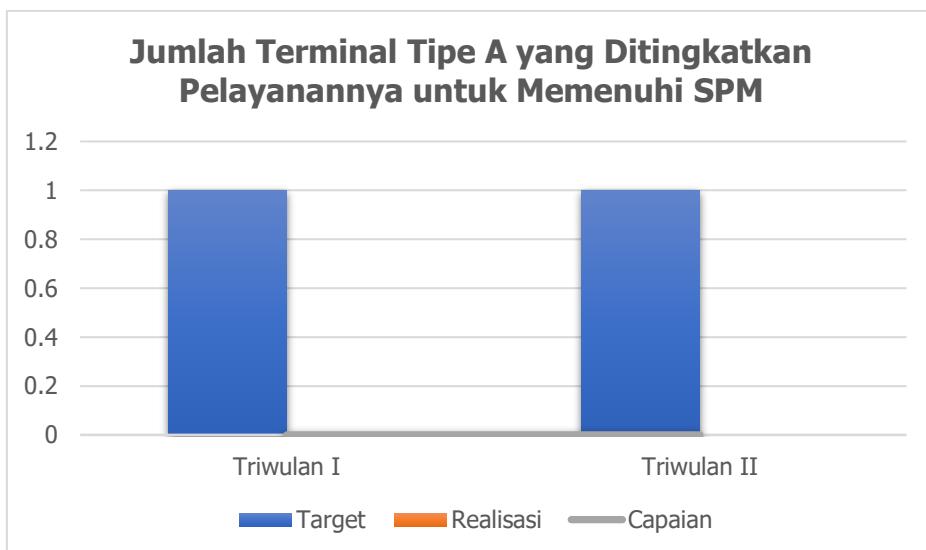
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Peningkatan terminal tipe A bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat berpergian menggunakan transportasi massal dari terminal. Kegiatan ini memerlukan dukungan dari seluruh unsur penyelenggara dan operator

angkutan yang berada di terminal untuk tetap menjaga dan menjamin standar pelayanan minimum yang harus diberikan bisa terlaksana dengan baik.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM.



Gambar II.5 Realisasi IKK Jumlah Terminal tipe A yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 unit yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan

- Dokumen perencanaan tersedia lengkap dan sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan;
 - Anggaran yang sudah tersedia tidak diblokir dan siap pakai;
 - Dukungan dari semua pihak dan penyelenggara hingga pengawas.
- ❖ Faktor Kegagalan
- Dokumen perencanaan tidak lengkap dan bahkan tidak sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan;
 - Anggaran yang sudah tersedia namun diblokir sehingga menyebabkan penundaan bahkan menggagalkan kegiatan;
 - Tidak adanya dukungan dari semua pihak dan penyelenggara hingga pengawas.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja
- Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :
- IKK 7.1 = Jumlah Terminal Tipe A yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM*
- Realisasi = 0 Unit*
- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja
- Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :
- $$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
- $$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$
- ❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- Adapun anggaran terkait Kegiatan Terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Triwulan II Tahun 2025 yaitu Kegiatan Terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 5.500.000.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Memilih dan memilih pelaksana kegiatan (pihak ketiga) dengan sangat selektif;
2. Mengawasi dengan cermat dan detail terhadap keseluruhan giat; dan
3. Melakukan monitoring secara berkala untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.4.2. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A Sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun telah melayani Angkutan Barang di jalan. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau memiliki 3 (tiga) Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A sebagai berikut :

1. Terminal Tipe-A BRPS Kota Pekanbaru

Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Luas lahan 37.470 ha dan Luas Bangunan Terminal sebesar 6.700 ha. Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Terminal Tipe-A BRPS Kota Pekanbaru memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas Utama : <ul style="list-style-type: none"> 1) Jalur Keberangkatan 2) Jalur Kedatangan 3) Ruang Tunggu 4) Area Parkir 5) Perlengkapan Jalan / Rambu 6) Loket Penjualan Tiket 7) Pusat Informasi 8) Gedung Utama/ Kantor 9) Peron | <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> 1) Klinik 2) Fasilitas Keamanan 3) Ruang Istirahat Pengemudi 4) Endapan Bus 5) Kios/ Kantin 6) Masjid 7) Toilet |
|--|---|

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A BRPS terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

a. Aspek pelayanan publik

Petugas memberikan informasi arah, lokasi terkait situasi di terminal. Mengarahkan bus sebagai petugas pengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada sopir dan penumpang.

b. Aspek keamanan

Petugas ditempatkan di beberapa pos pemantauan situasi di terminal upaya menjaga keamanan disekitar terminal, melakukan *rampcheck* untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum sebelum berangkat, dan sistem di terminal sudah dilengkapi dengan CCTV untuk kemanan pengguna terminal.

c. Aspek kenyamanan

Sudah tersedia fasilitas-fasilitas penunjang di terminal seperti, ruang tunggu, tempat ibadah, ruang istirahat supir, ruang ibu menyusui dan klinik agar kenyamanan pengguna terminal tetap diutamakan.

d. Aspek sosial

Sifat dan sikap terhadap masyarakat sebagai pengguna terminal harus diterapkan oleh setiap petugas, pelayanan yang ramah dan sopan oleh petugas Terminal Tipe-A BRPS agar terjalin hubungan yang harmonis.

e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana

Fasilitas utama dan penunjang sudah tersedia di Terminal Tipe-A BRPS, meskipun beberapa kondisi fasilitas ada yang rusak ringan.

f. Aspek inovasi dalam bekerja

Setiap petugas terminal disaat bertugas sudah memiliki inovasi-inovasi dalam bekerja, seperti aktif dalam memberikan informasi pengumuman, pembagian masker secara gratis, dan mengupload beberapa kegiatan-kegiatan terminal di media sosial.

2. Terminal Tipe-A Bangkinang

Merupakan Terminal Tipe-A pada kelas III dengan pelayanan AKAP dan AKDP lebih kedalam sistem transit atau bersifat lintas dengan luas 3600 m² dan terletak di pusat kota Bangkinang, Kab. Kampar. Terminal Tipe-A Bangkinang memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut :

• **Fasilitas Utama :**

- 1) Jalur Kedatangan & Keberangkatan
- 2) Ruang Tunggu
- 3) Area Parkir
- 4) Perlengkapan Jalan / Rambu
- 5) Loket Penjualan Tiket
- 6) Pusat Informasi
- 7) Gedung Utama/ Kantor

• **Fasilitas Pendukung :**

- 1) Endapan Bus
- 2) Fasilitas Keamanan
- 3) Kios/ Kantin
- 4) Musholla
- 5) Toilet
- 6) Wifi
- 7) Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Bangkinang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- a. Aspek pelayanan publik
- b. Aspek keamanan
- c. Aspek kenyamanan
- d. Aspek sosial, dan
- e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana
- f. Aspek inovasi dalam bekerja

3. Terminal Tipe-A Dumai

Terminal Dumai terletak di Kota Dumai dan berada pada lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan pelabuhan Kota Dumai, memiliki integrasi dengan moda angkutan penyeberangan. Terminal ini melayani trayek angkutan AKAP dan AKDP.

Terminal Tipe-A Dumai memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut :

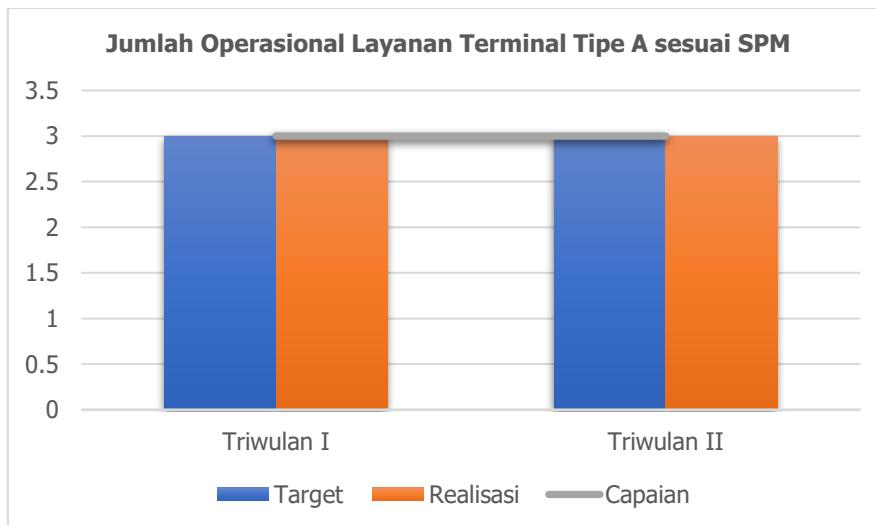
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Utama :1) Jalur Kedatangan2) Jalur Keberangkatan3) Ruang Tunggu4) Area Parkir5) Perlengkapan Jalan / Rambu6) Loket Penjualan Tiket7) Pusat Informasi8) Gedung Utama/ Kantor9) Peron | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Pendukung :1) Endapan Bus2) Ruang Istirahat Pengemudi3) Kios/ Kantin4) Musholla5) Toilet |
|---|--|

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Bangkinang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- a. Aspek pelayanan publik
- b. Aspek keamanan
- c. Aspek kenyamanan
- d. Aspek sosial, dan
- e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana
- f. Aspek inovasi dalam bekerja

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 3 unit jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 3 unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM.



Gambar II.6 Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 3 unit yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.

❖ Faktor Kegagalan

- SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 7.2 = Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

Realisasi = 3 Unit

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 yaitu Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 3.573.549.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 4.312.790.890,- atau mencapai 60%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Upaya peningkatan kinerja oleh petugas di terminal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna terminal dengan kekompakkan antar pimpinan dan staf di lingkukan organisasi pada Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A,
2. Meningkatkan inovasi-inovasi dalam bekerja serta dukungan dari kemajuan dan pengadaan fasilitas pendukung operasional terminal,
3. Memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang di area terminal,
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap Terminal Tipe A di BPTD Kelas II Riau untuk terus memantau kebutuhan dan kerusakan sarana dan prasarana yang perlu segera diperbaiki.

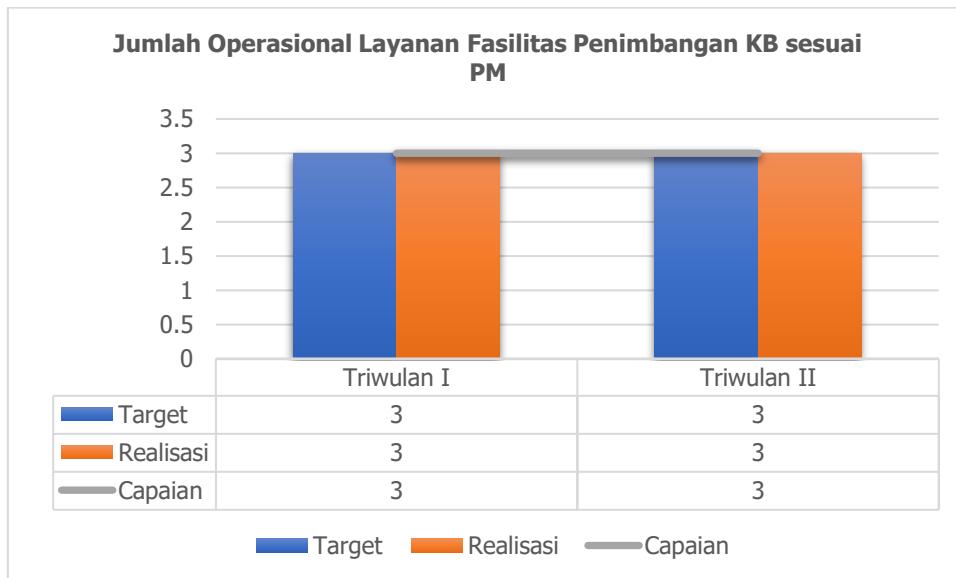
II.2.4.3. IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai PM

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Setiap kendaraan bermotor khususnya angkutan barang memiliki syarat dan ketentuan khusus untuk dapat beroperasi, diantaranya adalah kondisi existing kendaraan, JBI (Jumlah Berat yang diizinkan) kendaraan, kapasitas angkutan, volume, konfigurasi sumbu, dan sebagainya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 3 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 3 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM.



Gambar II.7 Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PP 80 Tahun 2012 tentang Penindakan Lalu Lintas;
- Surat Keputusan DJPD Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Surat Keputusan DJPD Nomor 5370 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 3 lokasi yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.

❖ Faktor Kegagalan

- SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 7.4 = Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM

Realisasi = 3 lokasi

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM Triwulan II Tahun 2025 yaitu Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 1.743.289.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 892.351.263,- atau mencapai 26%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan kendaraan angkutan barang terkait kriteria pelanggaran kendaraan angkutan barang berupa pelanggaran *Over Dimension Over Loading*.
2. Memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama;
3. Melaksanakan pengawasan dan penindakan di UPPKB terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

II.2.4.4. IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan pengendalian lalu lintas event khusus yang dimaksudkan adalah kegiatan pengawasan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap lalu lintas pada event khusus diantaranya adalah event lebaran Idul Fitri dan peringatan hari Natal serta Tahun Baru Masehi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus.



Gambar II.8 Realisasi IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 2 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat

Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan;
 - Berkoordinasi dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk persiapan rencana pengawasan;
 - Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan.
- ❖ Faktor Kegagalan
 - Ketersediaan anggaran menentukan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - Kegiatan pengawasan angkutan barang merupakan kegiatan fisik yang membutuhkan anggaran untuk operasional;
 - Jika anggaran tidak tersedia maka kegiatan pengawasan angkutan barang tidak dapat dilaksanakan.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 7.6 = Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus

Realisasi = 1 kegiatan

- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja
 - Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

- ❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - Adapun anggaran terkait Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus Triwulan II Tahun 2025 yaitu Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Lebaran Idul Fitri 1446 H memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 1.001.702.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 167.455.122,- atau mencapai 8%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Setelah kegiatan dilaksanakan maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan melakukan evaluasi terkait hasil pengawasan;

2. Mengusulkan anggaran di tahun-tahun selanjutnya guna keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengawasan angkutan barang;
3. Menindaklanjuti perusahaan angkutan barang yang mengoperasikan kendaraan diluar ketentuan yang berlaku, baik dari segi muatan dan lain sebagainya.

II.2.5. SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 2 (dua) IKK, yaitu:

1. IKK 8.2 : Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM
2. IKK 8.4 : Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.8 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP					14.68%
IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	9	9	2	22%
IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	28	28	2	7%

II.2.5.1. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

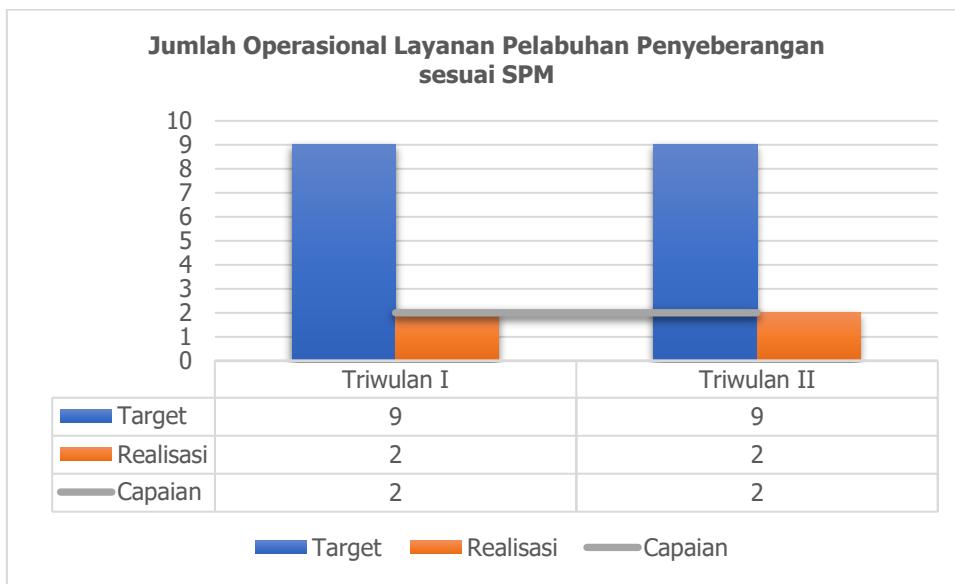
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan, Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan Kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 9 lokasi maka

capaian kinerja mencapai 22%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus.



Gambar II.9 Realisasi IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 9 lokasi yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
- SOP berjalan dengan efektif dan efisien;
- Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.

❖ Faktor Kegagalan

- Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;

- SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja
- Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :
- IKK 8.2 = Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM*
- Realisasi = 2 lokasi*
- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja
- Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :
- $$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
- $$= \frac{2}{9} \times 100\% = 22\%$$

- ❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- Adapun anggaran terkait Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 yaitu Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 1.049.345.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 584.749.645,- atau mencapai 28%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP yang beroperasi,
3. Meningkatkan kualitas SDM operasional yang ada pada setiap Pelabuhan.

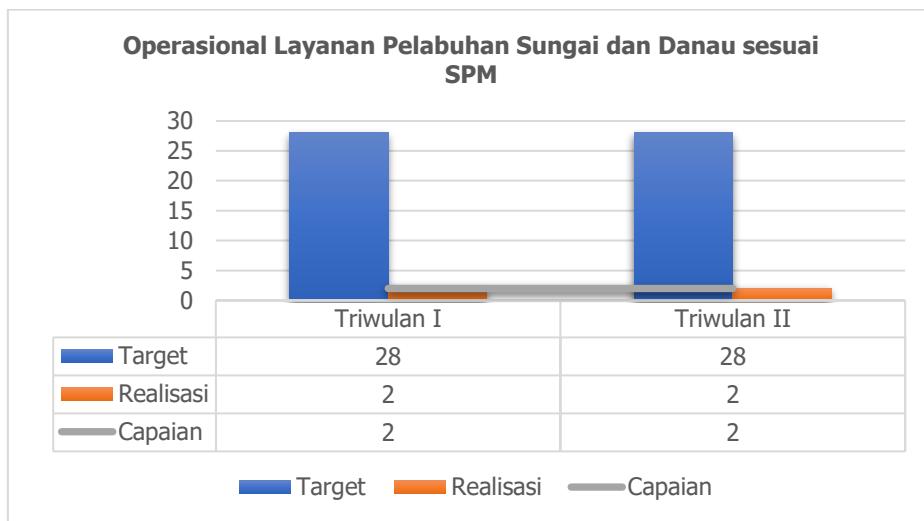
II.2.5.2. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan, Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan Kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 28 lokasi maka capaian kinerja mencapai 7%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM



Gambar II.10 Realisasi IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 28 lokasi yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
- SOP berjalan dengan efektif dan efisien;

- Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- ❖ Faktor Kegagalan
 - Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
 - SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 8.4 = Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

Realisasi = 2 lokasi
- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{28} \times 100\% = 7\%$$
- ❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025 yaitu Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 954.000.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 45.518.880,- atau mencapai 2%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP yang beroperasi,
3. Meningkatkan kualitas SDM operasional yang ada pada setiap Pelabuhan.

II.2.6. SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 6 (enam) IKK, yaitu:

1. IKK 9.1 : Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata,

2. IKK 9.2 : Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum,
3. IKK 9.3 : Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri,
4. IKK 9.4 : Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin,
5. IKK 9.5 : Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan,
6. IKK 9.6 : Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.9 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					0%
IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 9.2	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 9.2	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 9.2	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%

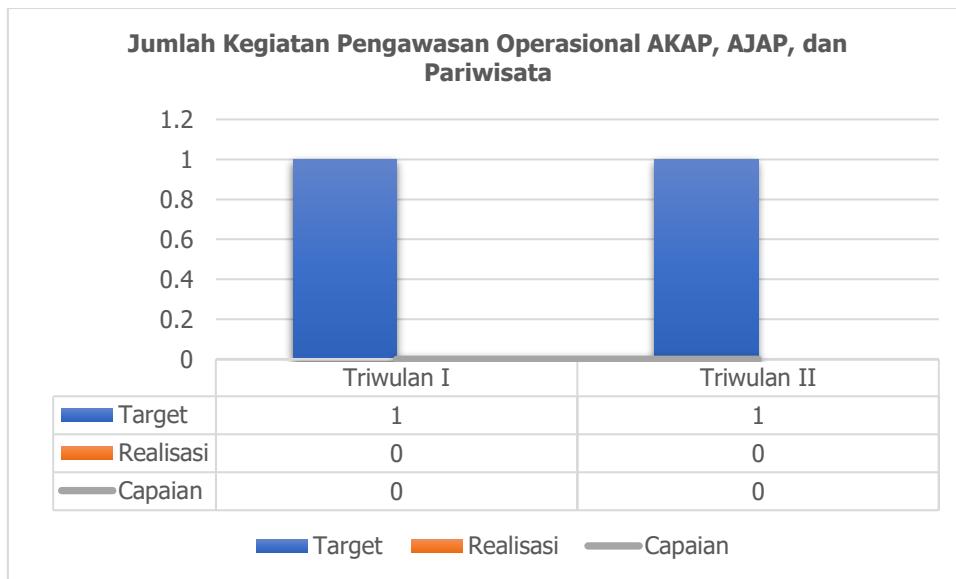
II.2.6.1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Setiap kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek memiliki standar-standar yang sesuai peraturan operasional, sehingga dibutuhkan pengawasan terkait hal-hal tersebut.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata.



Gambar II.11 Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Persiapan rencana pelaksanaan yang akan disusun;
 - Rencana akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - Mengajukan pergeseran anggaran jika tidak tersedia guna mendukung terlaksananya kegiatan.
- ❖ Faktor Kegagalan
 - Ketersediaan anggaran menjadi penentu pelaksanaan kegiatan;
 - Kegiatan fisik yang membutuhkan anggaran pelaksanaan untuk operasional;

- Pihak PO yang tidak kooperatif dikhawatirkan dapat menghambat rencana pelaksanaan pemeriksaan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 9.1 = Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata
Realisasi = 0 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2025 yaitu Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 1.001.702.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 167.455.122,- atau mencapai 8,36%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan setelah kegiatan pengawasan sudah terlaksana;
2. Melaksanakan upaya penanganan tindak lanjut jika terdapat PO, AKAP, AJAP, dan Pariwisata yang beroperasi tidak sesuai ketentuan; dan
3. Mengusulkan kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata tetap berjalan ditahun-tahun berikutnya, mengingat kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang penting untuk mendukung PO AKAP, AJAP, dan Pariwisata tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

II.2.6.2. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum

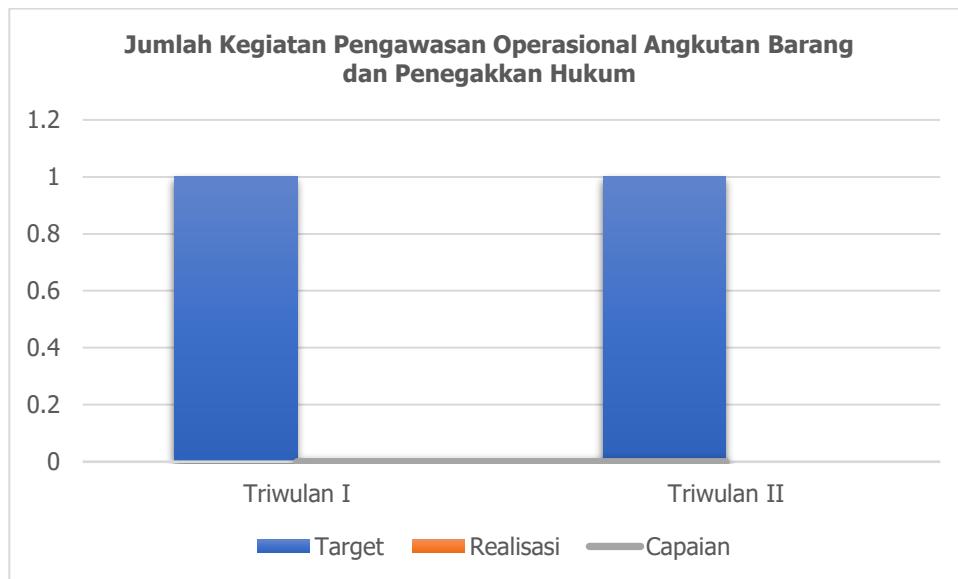
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

Alat penimbangan adalah seperangkat alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindahkan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum.



Gambar II.12 Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan.

- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I

Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan;
 - Berkoordinasi dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk persiapan rencana pengawasan;
 - Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan.
- ❖ Faktor Kegagalan
 - Ketersediaan anggaran menentukan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - Kegiatan pengawasan angkutan barang merupakan kegiatan fisik yang membutuhkan anggaran untuk operasional;
 - Jika anggaran tidak tersedia maka kegiatan pengawasan angkutan barang tidak dapat dilaksanakan.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 9.2

= Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum

Realisasi = 0 kegiatan

- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja
- Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

- ❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum Triwulan II Tahun 2025 yaitu Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 1.001.702.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 167.455.122,- atau mencapai 8,36%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Setelah kegiatan dilaksanakan maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan melakukan evaluasi terkait hasil pengawasan;

2. Mengusulkan anggaran di tahun-tahun selanjutnya guna keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengawasan angkutan barang;
3. Menindaklanjuti perusahaan angkutan barang yang mengoperasikan kendaraan diluar ketentuan yang berlaku, baik dari segi muatan dan lain sebagainya; dan
4. Mengusulkan perpanjangan kartu PPNS guna legalitas saat melaksanakan kegiatan pengawasan angkutan barang.

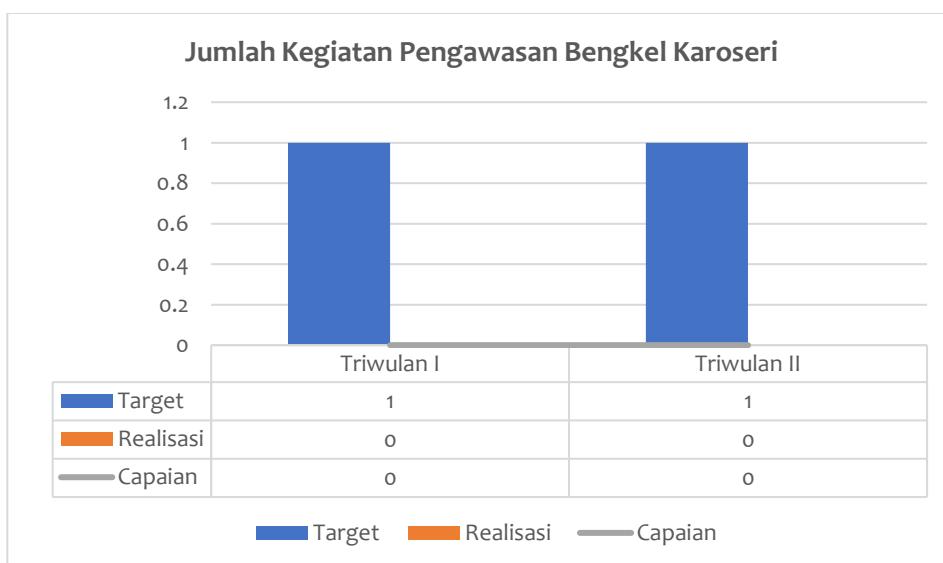
II.2.6.3. IKK 9.3 Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Setiap kendaraan yang di proses pada bengkel karoseri sebagai pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pembedikan Kendaraan Bermotor, mempunyai spesifikasi teknis dan syarat sesuai dengan tipe Kendaraan Bermotor, sebelum diberikan izin beroperasi maka dibutuhkan pengawasan terhadap bengkel-bengkel karoseri.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri.



Gambar II.13 Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Rencana pelaksanaan akan segera disusun untuk pelaksanaan;
- Koordinasi awal dengan pihak bengkel karoseri terkait rencana pengawasan;
- Anggaran yang tersedia akan mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

❖ Faktor Kegagalan

- Jika anggaran tidak tersedia maka kegiatan dapat dipastikan tidak terlaksana;
- Jika tidak ada koordinasi tahap awal maka akan menghambat pelaksanaan;
- Jika adanya bengkel karoseri yang tidak kooperatif.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 9.3 = Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri

Realisasi = 0 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Triwulan II Tahun 2025 yaitu Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan

Bengkel Karoseri memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 515.155.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 95.308.179,- atau mencapai 9,25%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan evaluasi pelaksanaan pengawasan bengkel karoseri;
2. Melakukan pembinaan kepada karoseri jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Mengusulkan anggaran pelaksanaan pengawasan bengkel karoseri pada tahun 2025 untuk pelaksanaan pada tahun 2026; dan
4. Menyusun kembali rencana pelaksanaan pengawasan bengkel karoseri untuk dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya guna mendukung terlaksananya kegiatan.

II.2.6.4. IKK 9.4 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin

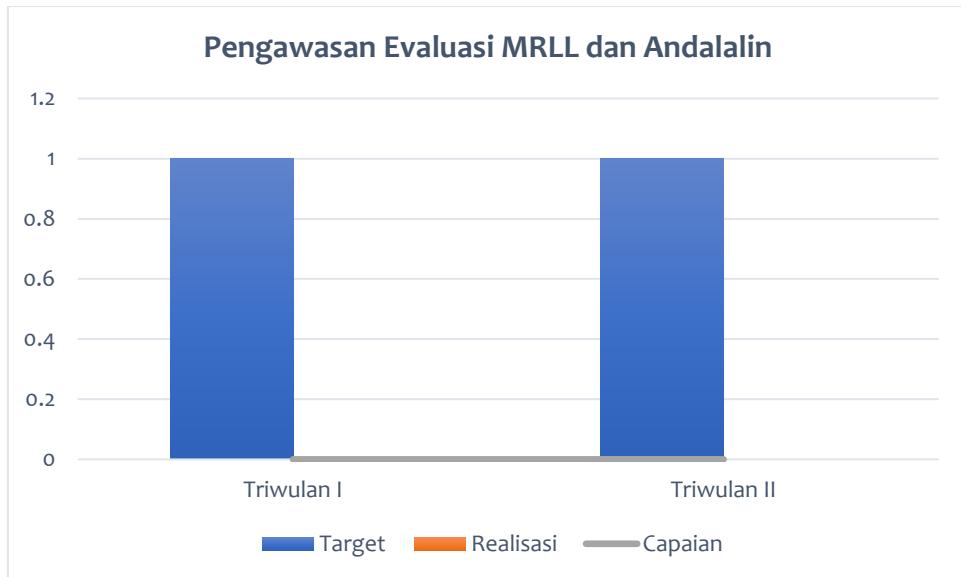
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin.



Gambar II.14 Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Adanya dukungan dari pihak pelaksana pembangunan;
 - Adanya rencana awal persiapan pelaksanaan MRLL ataupun Andalalin;
 - Adanya pembahasan evaluasi terkait pelaksanaan MRLL ataupun Andalalin.
- ❖ Faktor Kegagalan
 - Jika pelaksanaan MRLL dan Andalalin dilaksanakan pihak ketiga sepenuhnya;

- Jika tidak ada rencana pelaksanaan MRLL dan Andalalin dipastikan indikator akan dihapus dari target pelaksanaan;
- Anggaran tidak tersedia maka kegiatan MRLL dan Andalalin dipastikan tidak dapat dilaksanakan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 9.4 = Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin

Realisasi = 0 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Triwulan II Tahun 2025 yaitu Jumlah Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 486.546.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 72.146.943,- atau mencapai 7,41%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait jika kedepannya akan ada pelaksanaan MRLL atau Andalalin;
2. Mengusulkan ketersediaan anggaran pelaksanaan;
3. Melaksanakan rencana evaluasi pelaksanaan jika kegiatan MRLL dan Andalalin sudah selesai dilaksanakan.

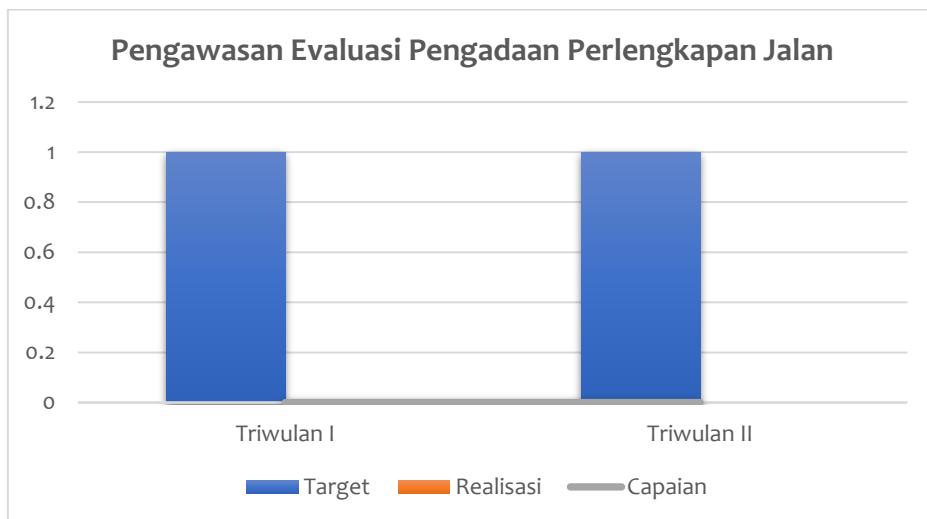
II.2.6.5. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan.



Gambar II.15 Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 – 2029;
 - PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
 - Optimalnya pengawasan pembangunan.

- ❖ Faktor Kegagalan
 - Tidak adanya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
 - Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 9.5 = Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan

Realisasi = 0 kegiatan
- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

- ❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 yaitu Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 5.556.500.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
2. Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progress kerja berjalan; dan
3. Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

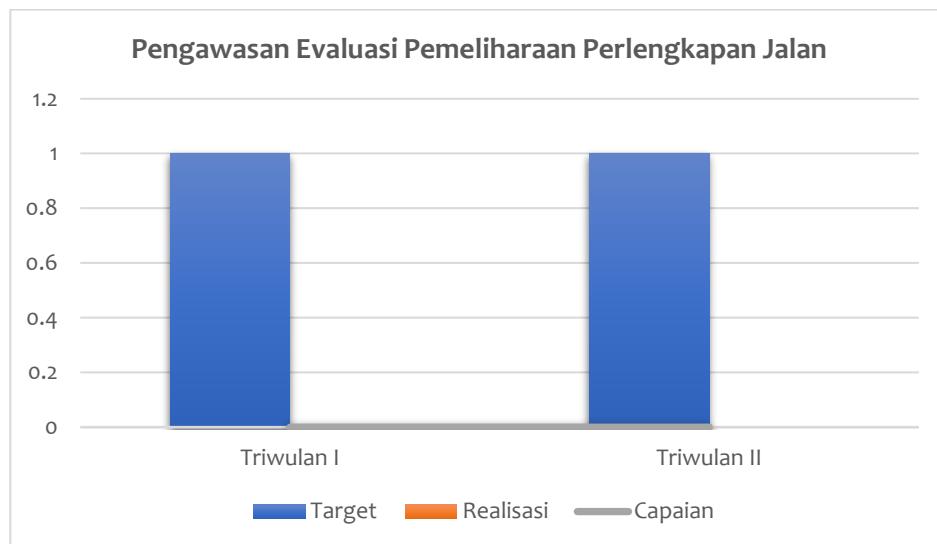
II.2.6.6. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.



Gambar II.16 Realisasi IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 – 2029;
 - PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
 - Optimalnya pengawasan pembangunan.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 9.6 = Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan

Realisasi = 0 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Triwulan II Tahun 2025 yaitu Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 5.556.500.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
2. Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progress kerja berjalan; dan
3. Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.7. SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 2 (dua) IKK, yaitu:

1. IKK 10.1 : Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman,
 2. IKK 10.2 : Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah.
- Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.10 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety					50%
IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	1	1	1	100%
IKK 10.2	Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	1	1	0	0%

II.2.7.1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual terhadap Landasan Kendaraan Bermotor yang meliputi:

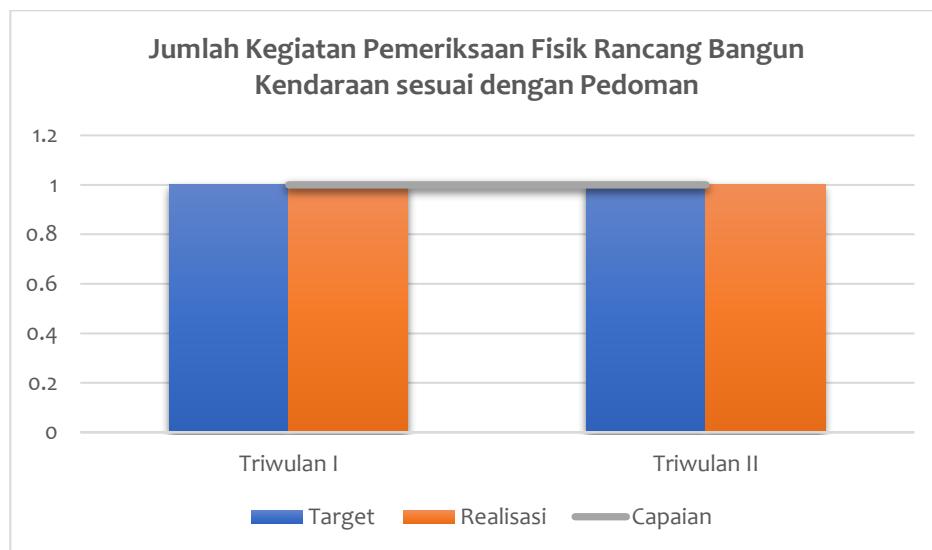
- a. Nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
- b. Nomor dan tipe motor penggerak;
- c. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, tutup corong, dan pipa saluran bahan bakar untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi bahan bakar;
- d. Kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
- e. Kondisi dan posisi pipa pembuangan untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi motor bakar;
- f. Ukuran roda dan ban sesuai spesifikasi desain yang diusulkan, serta kondisi ban;
- g. Kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan;
- h. Kondisi sistem suspensi berupa pegas, daun, kantong udara, dan penyangga;
- i. Kondisi rem utama pada roda depan, tengah, dan/atau belakang, serta kebocoran sistem rem;
- j. Kondisi penutup atau *casing* lampu dan alat pemantul cahaya;
- k. Kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan Bermotor seperti alat penunjuk kecepatan;
- l. Kondisi kaca spion bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
- m. Bentuk bumper bagi Landasan Kendaraan bermotor berupa *chassis* kabin;

- n. Kendaraan dan kondisi perlengkapan Kendaraan Bermotor berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan alat pembuka roda;
- o. Kendaraan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- p. Kondisi badan kendaraan, kaca-kaca bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin, engsel, dan tempat duduk; dan
- q. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukan.

Sehingga, setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe Kendaraan Bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan harus meregistrasikan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan akan diberikan SRUT oleh Direktur Jenderal. Tahapan ini melalui penguji Kendaraan Bermotor Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman.



Gambar II.17 Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Kelengkapan & Kesesuaian Dokumen;
- Kendaraan Sesuai Standar Teknis;
- Kesesuaian antara Rancang Bangun dan Realisasi Fisik;
- Pelaksanaan Pemeriksaan yang Sistematis & Profesional;
- Pemanfaatan Sistem Online (VTA / Uji Tipe Online).

❖ Faktor Kegagalan

- Ketidaksesuaian Fisik Kendaraan;
- Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Valid;
- Modifikasi Tanpa Persetujuan atau Tidak Terdaftar;
- Petugas Pemeriksa Tidak Dapat Melakukan Verifikasi Fisik Lengkap;
- Kesalahan Input Data di Sistem VTA / Uji Tipe.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 10.1

= Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman

Realisasi = 1 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman Triwulan II Tahun 2025 yaitu Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 515.155.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 95.308.179,- atau mencapai 9,25%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi yang baik dengan pihak bengkel karoseri terkait dengan perkembangan dan kondisi karoseri;
2. Berkoordinasi dengan pengujian terkait hasil-hasil pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan yang telah diperiksa;
3. Mengusulkan anggaran terkait kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan.

II.2.7.2. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala Di Daerah

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

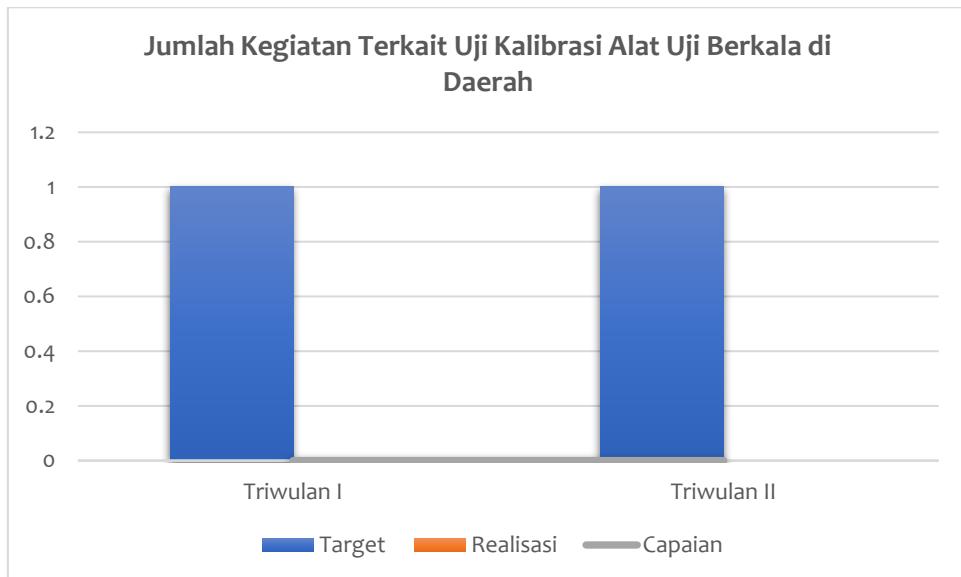
Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Riau, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Guna memenuhi seluruh persyaratan teknis dan laik jalan dibutuhkan standarisasi pengujian berkala.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target

Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah.



Gambar II.18 Realisasi IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Adanya dukungan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pengujian kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat untuk mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar;

- Kepatuhan terhadap Standar dan Prosedur Kalibrasi;
 - Kompetensi Petugas Terkait (Petugas/operator alat memiliki pengetahuan teknis memadai untuk mendukung proses kalibrasi);
 - Kondisi Fisik dan Fungsi Alat Masih Layak Kalibrasi.
- ❖ Faktor Kegagalan
- Tidak adanya dukungan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pengujian kendaraan bermotor;
 - Keterlambatan atau Tidak Dilakukannya Kalibrasi (Kalibrasi tidak dilakukan tepat waktu karena alasan anggaran, jadwal penuh, atau kelalaian);
 - Peralatan Rusak atau Tidak Layak Kalibrasi (Alat dalam kondisi tidak berfungsi optimal atau mengalami kerusakan permanen) (misal: sensor rusak, rangka bengkok);
 - Kurangnya Perawatan Peralatan Kalibrasi oleh Teknisi Pengujian

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$IKK 10.2 = \text{Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah}$$

$$\text{Realisasi} = 0 \text{ kegiatan}$$

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 515.155.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 95.308.179,- atau mencapai 9,25%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan agar seluruh UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) memenuhi standar dengan cara melakukan monitoring;
2. Memberikan informasi terkait dengan pentingnya standar pengujian di seluruh UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor);

3. Mengupayakan SDM penguji memenuhi kriteria untuk menyesuaikan standarisasi pengujian di UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor);
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin agar seluruh UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) menjalankan pengujian sesuai standar;
5. Mengumpulkan dan mengevaluasi jika ada terjadi kendala-kendala pada seluruh UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor) agar mengurasi resiko tidak selarasnya proses pengujian berkala kendaraan bermotor.

II.2.8. SK11 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 11 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 2 (dua) IKK, yaitu:

1. IKK 11.1 : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis,
2. IKK 11.2 : Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.11 Capaian IKK dan SK Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan					0%
IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	1378	1378	0	0%
IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman	Lokasi	4	4	0	0%

II.2.8.1. IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis

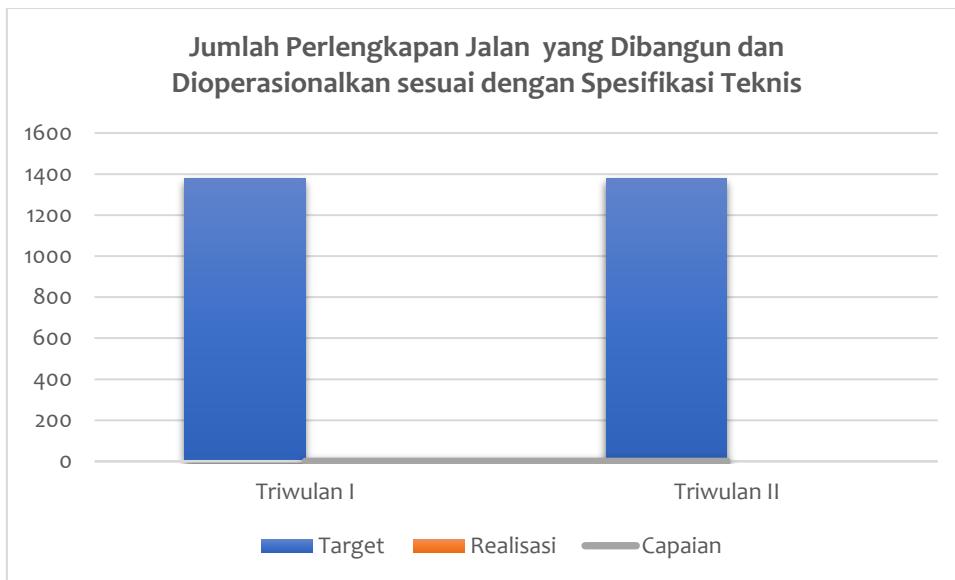
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Triwulan II Tahun 2025

sebanyak 0 unit jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1378 unit maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.



Gambar II.19 Realisasi IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 – 2029;
- PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1378 unit yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Tersedianya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 11.1

= Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis

$$\text{Realisasi} = 0 \text{ unit}$$

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1378} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 6.039.528.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
2. Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progress kerja berjalan; dan
3. Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.8.2. IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman

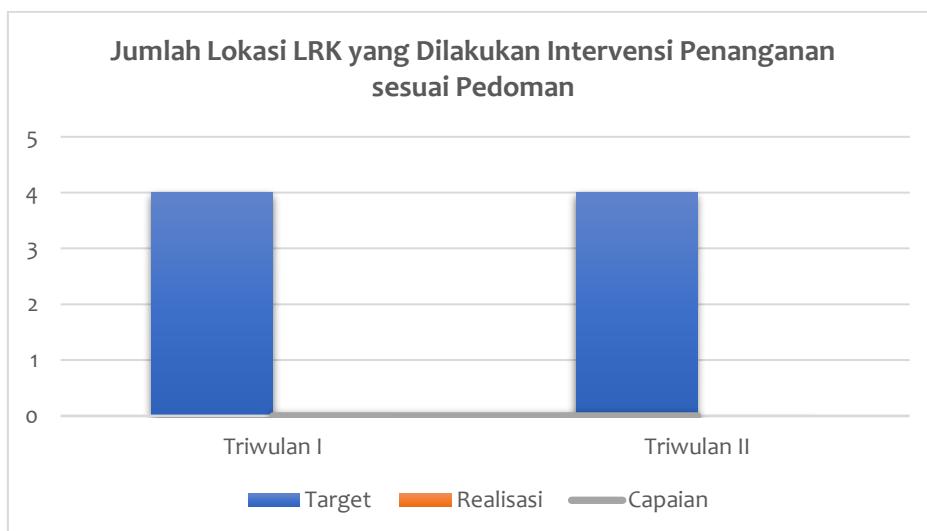
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Perbaikan lokasi rawan kecelakaan meliputi analisis data kecelakaan, penerapansolusi rekayasa jalan dan lalu lintas, serta manajemen lalu lintas yang terintegrasi untuk mengurangi angka dan korban kecelakaan.

Solusi rekayasa dapat mencakup perbaikan jalan, pemasangan marka jalan, penambahan rambu lalu lintas, cermin tikung, *rumble strip*, dan *warning light*. Selain itu ada juga upaya peningkatan kesadaran pengguna jalan dan pengelolaan factor penyebab kecelakaan lainnya seperti kendaraan dan lingkungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman.



Gambar II.20 Realisasi IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 – 2029;
- PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 4 lokasi yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Tersedianya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 11.2 = Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman

Realisasi = 0 lokasi

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{4} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 756.500.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;

2. Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progress kerja berjalan; dan
3. Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.9. SK12 Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 12 Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 2 (dua) IKK, yaitu:

1. IKK 12.1 : Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda,
2. IKK 12.2 : Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.12 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK 12	Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan					0%
IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	200	200	0	0%
IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	200	200	0	0%

II.2.9.1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

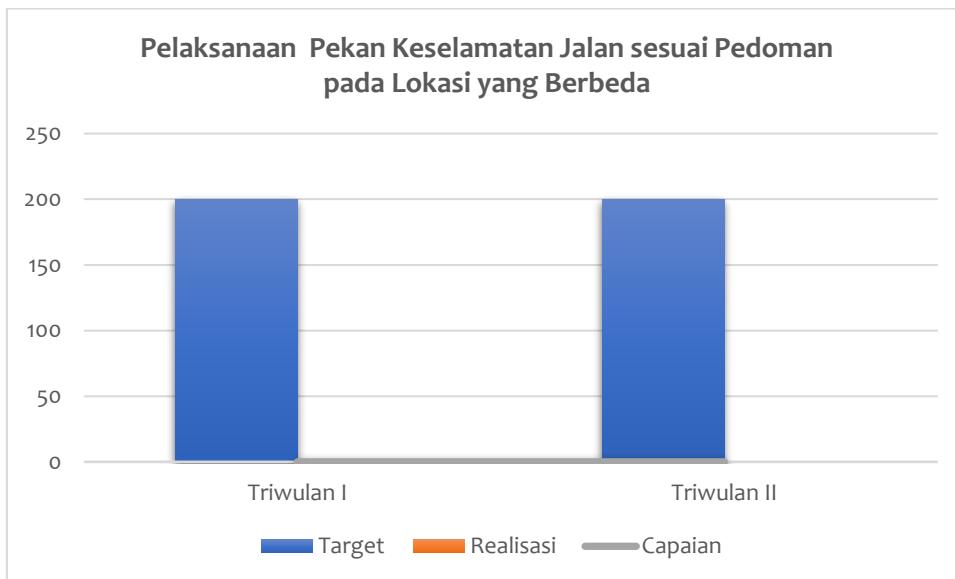
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 orang jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 200 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda.



Gambar II.21 Realisasi IKK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 01 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 200 orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I

Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 12.1

= Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

Realisasi = 0 orang

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 0,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Menjangkau ke elemen masyarakat yang lebih tepat sasaran,
2. Menginisiasi kegiatan yang menarik minat generasi millenial untuk tertarik dan peduli terhadap keselamatan bertransportasi,

3. Melaksanakan sosialisasi dengan banyak cara baik via online maupun via offline.

II.2.9.2. IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Salah satu bentuk sosialisasi keselamatan transportasi darat berupa penanaman budaya berkeselamatan di bidang transportasi darat, maka diperlukan peralatan pendukung dan fasilitas dalam penyampaian pesan keselamatan transportasi darat kepada masyarakat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 orang jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 200 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda.



Gambar II.22 Realisasi IKK Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- PM Perhubungan No. 01 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025
- Adapun target IKK Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 200 Orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan
- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
 - Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- ❖ Faktor Kegagalan
- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
 - Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Kurangnya SDM.
- ❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 12.2 = Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

Realisasi = 0 orang

- ❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 0,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan inovasi dalam melaksanakan sosialisasi terhadap anak usia dini maupun melalui staf pengajar Pendidikan anak usia dini,
2. Menginisiasi kegiatan yang menarik minat generasi usia dini untuk tertarik dan peduli terhadap keselamatan bertransportasi,
3. Melaksanakan sosialisasi dengan banyak cara baik via online maupun via offline.

II.2.10. SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 12 Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 12 (Dua Belas) IKK, yaitu:

1. IKK 14.1 : Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat,
2. IKK 14.2 : Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat,
3. IKK 14.3 : Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan,
4. IKK 14.4 : Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat,
5. IKK 14.5 : Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan,
6. IKK 14.6 : Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat,
7. IKK 14.7 : Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat,
8. IKK 14.8 : Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor),
9. IKK 14.9 : Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa,
10. IKK 14.10 : Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja,
11. IKK 14.11 : Kegiatan mendukung Pembangunan ZI,
12. IKK 14.12 : Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.13 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Layanan Perkantoran

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
			T	R	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran			31.14%	
IKK 14.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	2
					50%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				T	R	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
IKK 14.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	34	34	18	52.94%
IKK 14.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	15	15	8	53.33%
IKK 14.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10	10	5	50%
IKK 14.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	2	0	0%
IKK 14.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	270	270	137	50.74%
IKK 14.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 14.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	6	6	4	66.67%
IKK 14.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	2	1	50%
IKK 14.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	0	0%
IKK 14.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	0	0%
IKK 14.12	Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan	1	1	0	0%

II.2.10.1. IKK 14.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri atas 4 tahapan diantaranya:

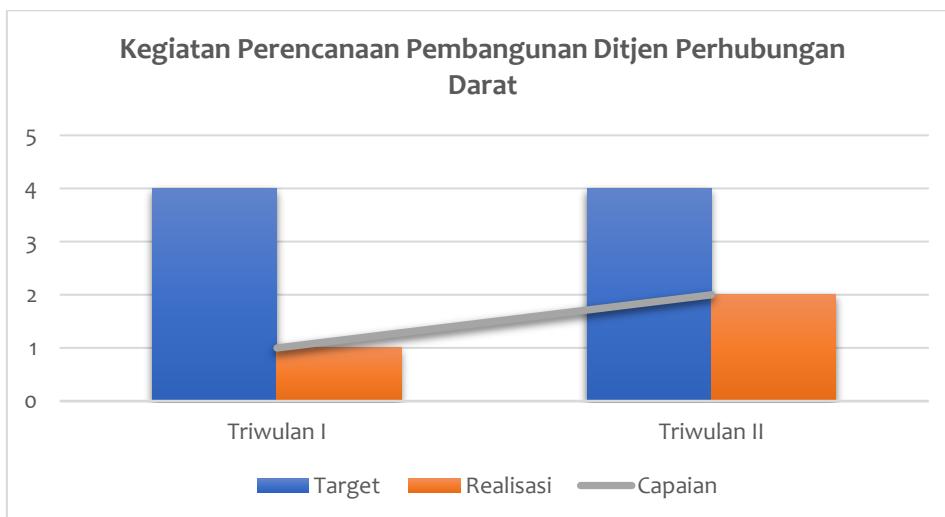
1. Penyusunan RKA-K/L Pagu Kebutuhan, Penyusunan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) Pagu Kebutuhan adalah proses penyusunan rencana kerja dan anggaran suatu kementerian/lembaga yang berpedoman pada pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu kebutuhan ini merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan mereka dalam satu tahun anggaran.
2. Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) Pagu Indikatif adalah proses menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan

pagu indikatif yang telah ditetapkan. Pagu indikatif adalah perkiraan awal anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja mereka. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, serta Kementerian Keuangan.

3. Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran, Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.
4. Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran, Penyusunan RKA-K/L alokasi anggaran adalah proses merinci anggaran yang telah dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk suatu tahun anggaran, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan merupakan penjabaran dari Renja K/L dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 4 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.23 Realisasi IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Intruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2019 melalui e-planning;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 4 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Ketersediaan dokumen data dukung kegiatan yang sah dan lengkap sesuai koordinasi dengan Direktorat Teknis;
- Penyusunan uraian kegiatan yang detail dan jelas sesuai dengan petunjuk teknis pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- Koordinasi dan ketelitian terhadap dokumen serta kepatuhan akan batas waktu yang telah ditetapkan.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak tersedianya dokumen data dukung kegiatan yang sah dan lengkap sesuai koordinasi dengan Direktorat Teknis;
- Penyusunan uraian kegiatan yang tidak detail dan kurang jelas serta tidak sesuai dengan petunjuk teknis pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- Kurangnya Koordinasi dan ketiadaan ketelitian terhadap dokumen serta kurang patuh akan batas waktu yang telah ditetapkan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.1 = Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi = 2 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Terkait Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan kesesuaian data dukung terkait anggaran yang diusulkan;
2. Berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait usulan prioritas yang akan diusulkan;
3. Menentukan skala prioritas usulan demi pemanfaatan anggaran yang baik dan tepat sasaran.

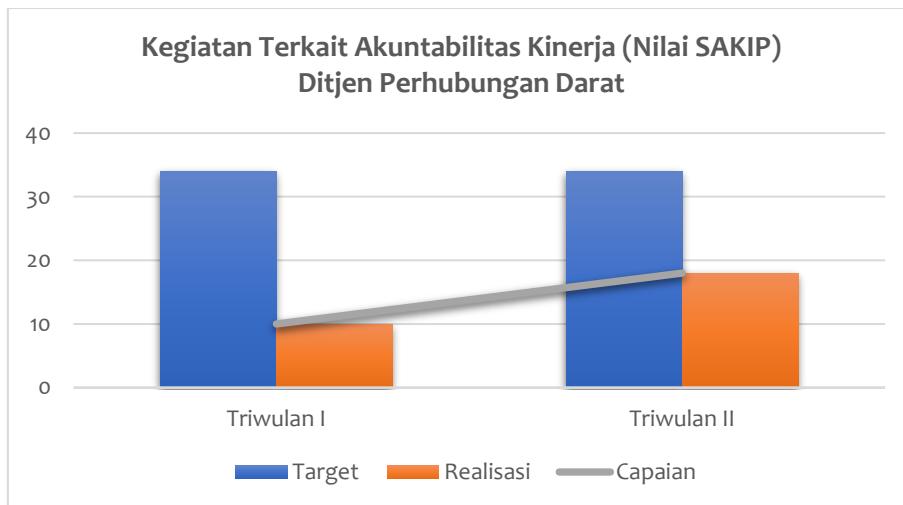
II.2.10.2. IKK 14.2 Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses membuat dokumen yang berisi sistematasi aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan SAKIP bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 18 dokumen jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 34 dokumen maka capaian kinerja mencapai 52.9%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.24 Realisasi IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 34 dokumen yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Data yang didapatkan dengan mudah dan tepat waktu;
- Kemudahan dalam akses aplikasi yang berkaitan dengan SAKIP;
- Koordinasi dan kolaborasi antar sub-unit kerja yang efektif dan efisien.

❖ Faktor Kegagalan

- Data yang didapatkan sulit dan selalu melebihi batas waktu;
- Kesulitan dalam akses aplikasi yang berkaitan dengan SAKIP;
- Koordinasi dan kolaborasi antar sub-unit kerja yang tidak efektif dan efisien.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

*IKK 14.2 = Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat
Realisasi = 18 dokumen*

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = \frac{18}{34} \times 100\% = 52,9\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan anggaran kegiatan fisik terkait SAKIP;
2. Mengusulkan penyimpanan *online* untuk mendukung penyimpanan berkas SAKIP sebagai data dukung Lembar Kerja Evaluasi SAKIP;
3. Mengusulkan kegiatan SAKIP dapat disosialisasikan kepada seluruh staf satuan pelayanan.

II.2.10.3. IKK 14.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

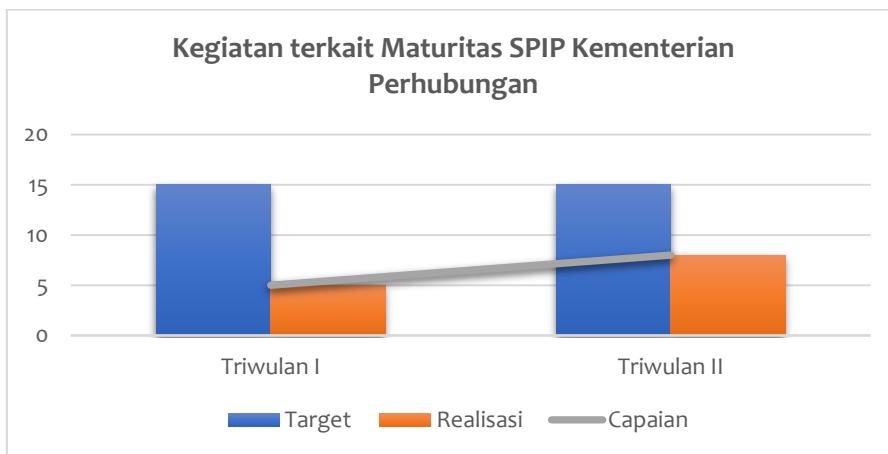
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk meningkatkan peran pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan kegiatan yang mendukung maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu serta penggunaan Teknologi Informasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengawasan intern sesuai ketentuan yang berlaku.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 8 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 15 kegiatan maka capaian kinerja mencapai

53.3%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan.



Gambar II.25 Realisasi IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 15 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Lingkungan Pengendalian yang Efektif yaitu pimpinan dan seluruh pegawai di BPTD/Unit Kerja saling menjunjung etika, disiplin serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik;
- Penilaian Resiko yang Terstruktur yaitu kemampuan BPTD/Unit Kerja dalam mengenali dan menilai risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi;
- Kegiatan Pengendalian yang memadai yaitu BPTD/Unit Kerja dapat menerapkan SOP yang konsisten, pengawasan berjenjang, penilaian kinerja secara berkala serta dokumentasi tertib.

❖ Faktor Kegagalan

- Lingkungan Pengendalian yang lemah yaitu pimpinan di BPTD/Unit kerja tidak menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas, etika dan budaya pengendalian;
- Penilaian risiko yang tidak dilakukan dan tidak tepat yaitu BPTD/Unit Kerja secara tidak aktif melakukan identifikasi dan analisis risiko, maka potensi hambatan terhadap pencapaian tujuan tidak akan terdeteksi sejak awal;
- Tidak dilaksanakan penilaian kinerja secara berkala yaitu BPTD/Unit kerja tidak melaksanakan penilaian dan pengawasan kinerja dari pegawai secara berkala sehingga pengawasan dan penilaian hanya dilaksanakan secara formalitas, laporan tidak diverifikasi dan temuan audit tidak ditindak lanjuti.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.3 = Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

Realisasi = 8 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{15} \times 100\% = 53,3\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Berupaya mengurangi resiko yang terjadi untuk setiap pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dengan meningkatkan mengidentifikasi resiko;
2. Mengusulkan kegiatan-kegiatan pengawasan berjenjang;
3. Menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

II.2.10.4. IKK 14.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

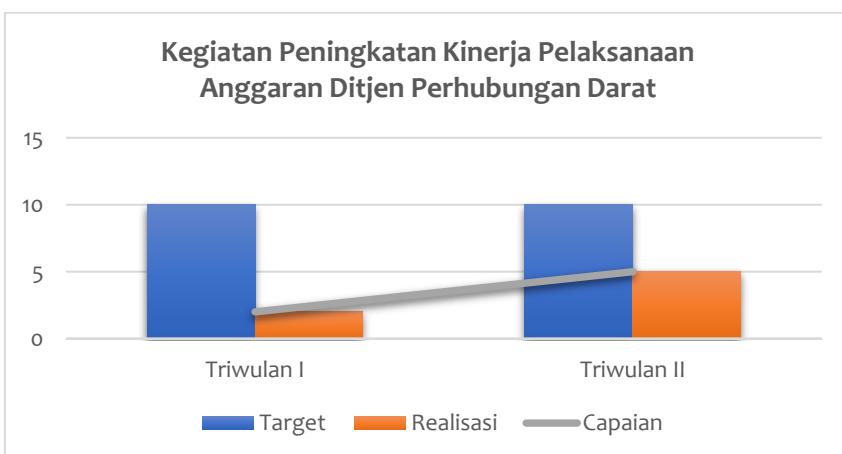
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Setiap pelaksanaan anggaran perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga, meliputi aspek implementasi, capaian *output*, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran, dan penyerapan anggaran.

Adapun IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Ini adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga. IKPA mengukur tiga aspek utama: kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari anggaran.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 10 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.26 Realisasi IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 mengatur tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Pelaporan Keuangan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 10 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Kualitas perencanaan telah dilaksanakan dengan kesesuaian data dukung yang digunakan untuk pengusulan anggaran;
- Pelaksanaan dari anggaran yang diupayakan percepatan proses pencairan anggaran;
- Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaporkan secara berkala;
- Capaian *output* yang baik.

❖ Faktor Kegagalan

- Jika realisasi rendah maka kinerja pelaksanaan anggaran menurun;
- Anggaran yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu menentukan persentase realisasi;
- Capaian *output* tidak sesuai.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.4 = Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat
Realisasi = 5 kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{10} \times 100\% = 50\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 memiliki target

keuangan Triwulan II senilai Rp. 21.486.973.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 10.841.193.240,- atau mencapai 25,23%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan percepatan penyerapan anggaran dalam semua kegiatan;
2. Menentukan prognosis keuangan setiap bulan;
3. Memastikan seluruh dokumen-dokumen pencairan sudah sesuai ketentuan berlaku agar mempercepat proses pencairan anggaran dan meningkatkan realisasi keuangan.

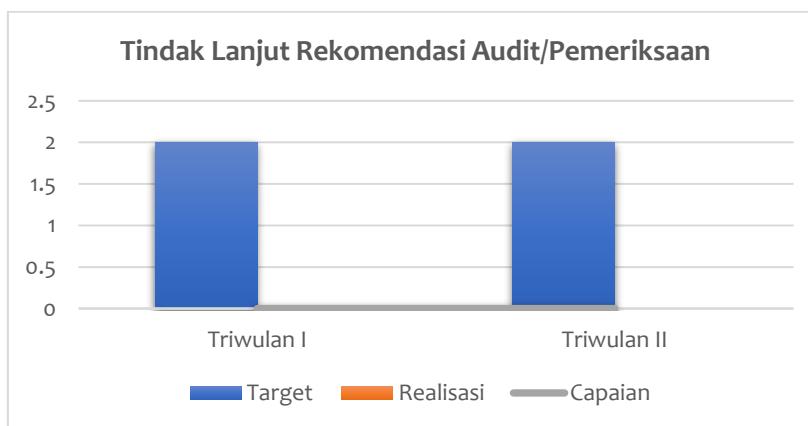
II.2.10.5. IKK 14.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Tindak lanjut rekomendasi audit adalah proses menanggapi dan melaksanakan saran yang diberikan oleh auditor setelah pemeriksaan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Tindak lanjut yang efektif dari rekomendasi audit sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan.



Gambar II.27 Realisasi IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 2 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pimpinan dan PPK terkait rekomendasi audit;
- Rekomendasi audit dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekomendasi;
- Rencana tindak lanjut rekomendasi hasil audit telah disusun dan akan dilaksanakan segera;

❖ Faktor Kegagalan

- Hasil rekomendasi di tinjau lanjuti tidak sesuai dengan ketentuan;
- Daya pengendalian intern yang lemah;
- Pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.5 = Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

Realisasi = 0 dokumen

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{2} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 21.486.973.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 10.841.193.240,- atau mencapai 25,23%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi untuk mengurangi temuan di tahun berikutnya;
2. Melanjutkan proses tindak lanjut rekomendasi audit hingga selesai;
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan terkait perihal rekomendasi audit.

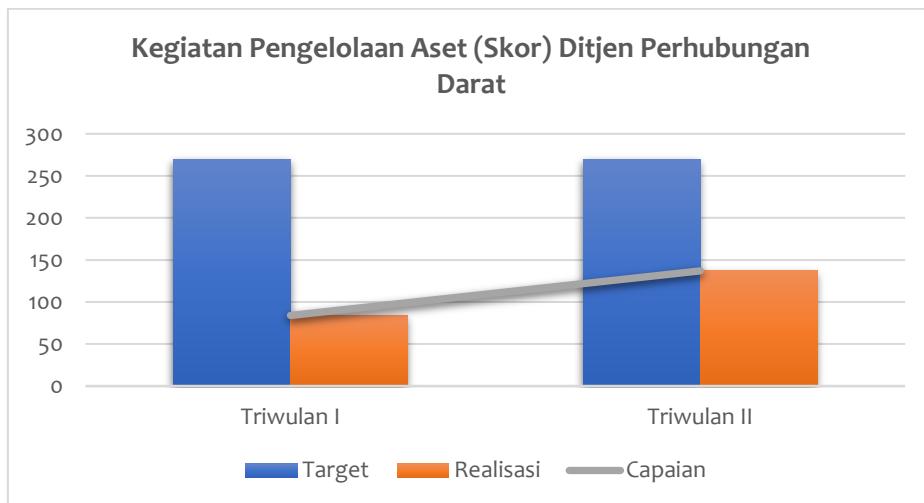
II.2.10.6. IKK 14.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mendukung tata kelola barang milik negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang tertib, efektif, dan efisien dibutuhkan pengelolaan barang milik negara secara komprehensif.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 137 dokumen jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 270 dokumen maka capaian kinerja mencapai 50.74%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.28 Realisasi IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target

sebanyak 270 dokumen yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Daftar barang ruangan Kantor Induk dan Satuan Pelayanan telah di susun;
- Rencana pembuatan *database* arsip akan segera dilaksanakan;
- Label aset sedang dalam proses cetak untuk ditempelkan pada aset-aset BMN.

❖ Faktor Kegagalan

- Tidak ada / hilang penomoran pada inventaris tertentu;
- Penggunaan *database* aset yang masih menggunakan kertas berpotensi tercecer atau hilang;
- Pemantauan aset tidak dilakukan secara berkala.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.6 = Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi = 137 dokumen

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{137}{270} \times 100\% = 50,74\% \end{aligned}$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 705.013.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 385.682.419,- atau mencapai 27,35%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan pendataan aset secara digital dan menyeluruh;
2. Menyusun konsep pembuatan *database* BMN;
3. Menyusun DBR (Daftar Barang Ruangan) di Kantor Induk dan Satuan Pelayanan;
4. Menginventarisir kondisi aset yang tidak layak pakai;

5. Melanjutkan proses aset yang belum lengkap data dukung;
6. Berkoordinasi dengan PPK terkait aset pengadaan di Tahun 2025 untuk di data.

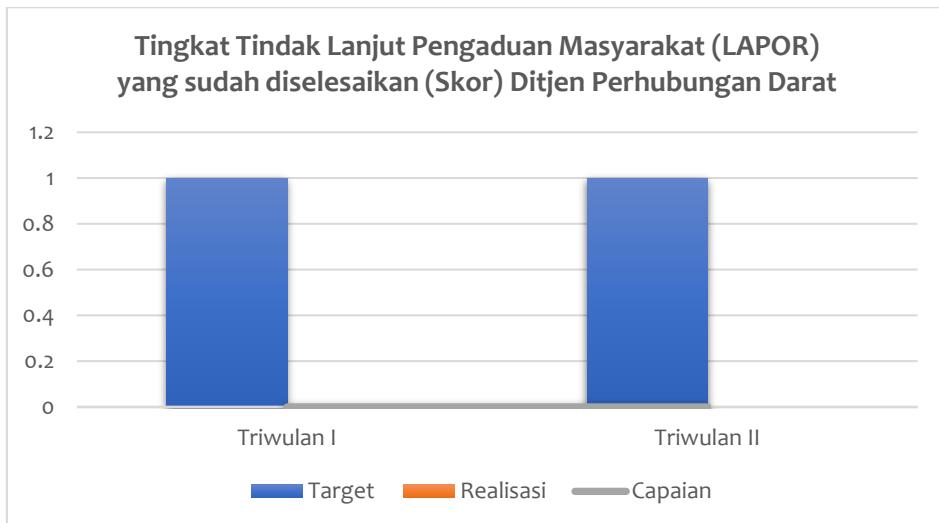
II.2.10.7. IKK 14.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Skor tindak lanjut ini merupakan salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi, yang menunjukkan efektivitas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di bidang transportasi darat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.29 Realisasi IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Tingkat informasi yang diberikan tentang transportasi darat rutin dilaksanakan melalui sosial media;
- Informasi yang diberikan berupa edukasi-edukasi keselamatan berkendara, bahaya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL);
- Satuan Pelayanan juga berpartisipasi dalam memberikan informasi melalui sosial media terkait angkutan barang, angkutan penumpang dan angkutan penyeberangan.

❖ Faktor Kegagalan

- Belum ada nya SDM yang menangani khusus terkait laporan dari masyarakat;
- Jangkauan pengaduan masyarakat terbatas jika melalui sosial media, dikarenakan tidak semua masyarakat aktif dan paham penggunaan sosial media;
- Sebagian masyarakat yang menggunakan sosial media tidak tertarik dengan informasi keselamatan transportasi.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.7

= Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yg sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Hubdat

Realisasi = 0 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen

Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengupayakan informasi terkait transportasi yang menarik;
2. Mengusulkan penambahan SDM yang menanggapi bagian pelaporan dari masyarakat;
3. Mengusulkan anggaran terkait iklan informasi mengenai transportasi darat.

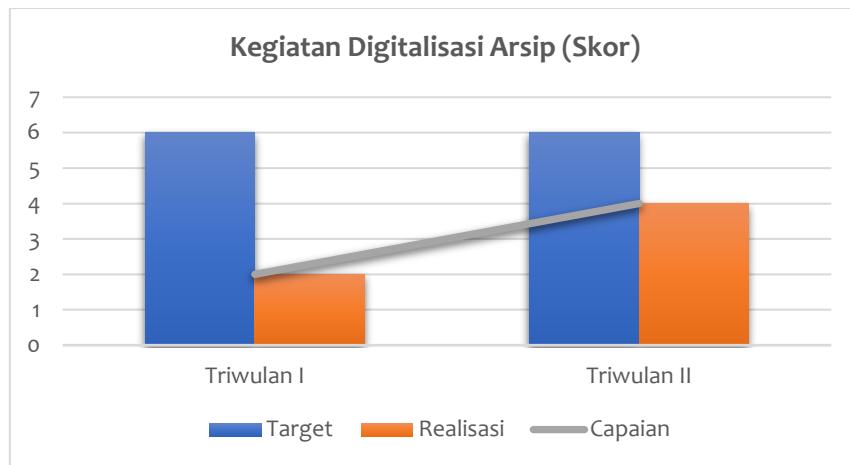
II.2.10.8. IKK 14.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Digitalisasi Arsip bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. Penerapan SRIKANDI di instansi pemerintah dilakukan dengan mengacu pada pedoman penerapan yang telah ditetapkan Arsip Nasional Republik Indonesia.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 4 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 66,67%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor).



Gambar II.30 Realisasi IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 6 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Memudahkan pengiriman surat-surat baik surat yang ditujukan ke lingkup internal maupun eksternal;
- Mempercepat proses distribusi surat tanpa harus mengirim surat fisik melalui ekspedisi;
- Menghemat belanja dan penggunaan ATK kantor.

❖ Faktor Kegagalan

- Masih terdapat kesalahan tujuan pengiriman surat;
- Koneksi internet mempengaruhi proses kinerja aplikasi;
- Sistem aplikasi arisp (SRIKANDI) masih mengalami *error*.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.8 = Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

Realisasi = 4 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{6} \times 100\% = 66,67\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengurangi kesalahan pengiriman surat;
2. Melaporkan jika terjadi kendala saat mengakses SRIKANDI;
3. Mengusulkan diklat aplikasi SRIKANDI.

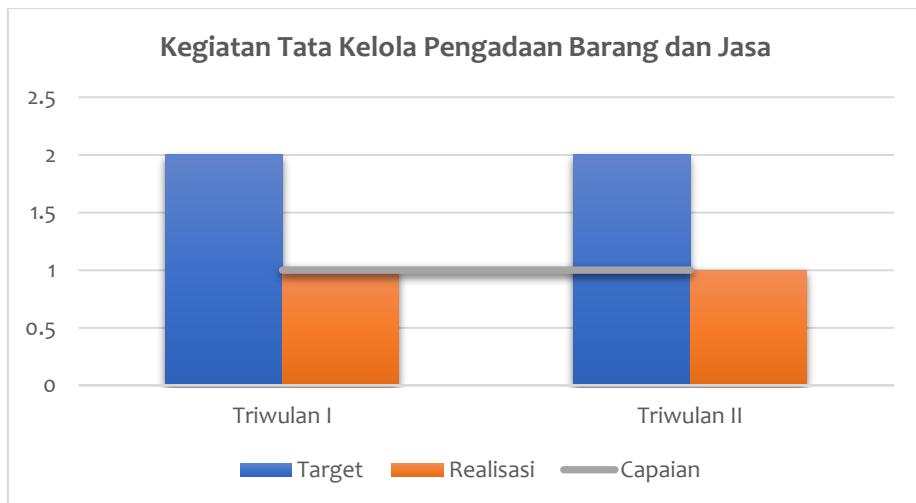
II.2.10.9. IKK 14.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah / Institusi lainnya / yang dibiayai oleh APBN / APBD / APB yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar II.31 Realisasi IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
 - Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- ❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 2 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.
- ❖ Faktor Keberhasilan
 - Anggaran tersedia untuk belanja barang operasional;
 - Percepatan proses pengadaan barang;
 - Percepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
- ❖ Faktor Kegagalan
 - Anggaran tersedia dan masih membutuhkan tambahan;
 - Jika dokumen tidak diselesaikan tepat waktu maka pencairan dipastikan akan mengalami keterlambatan;
 - Terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa dipastikan tidak terlaksana dikarenakan efisiensi anggaran.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.9 = Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi = 1 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 705.013.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 385.682.419,- atau mencapai 27,35%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan penambahan anggaran;
2. Menentukan prioritas pengadaan barang yang diusulkan;
3. Mengusulkan pengadaan baju dinas, peralatan kehumasan.

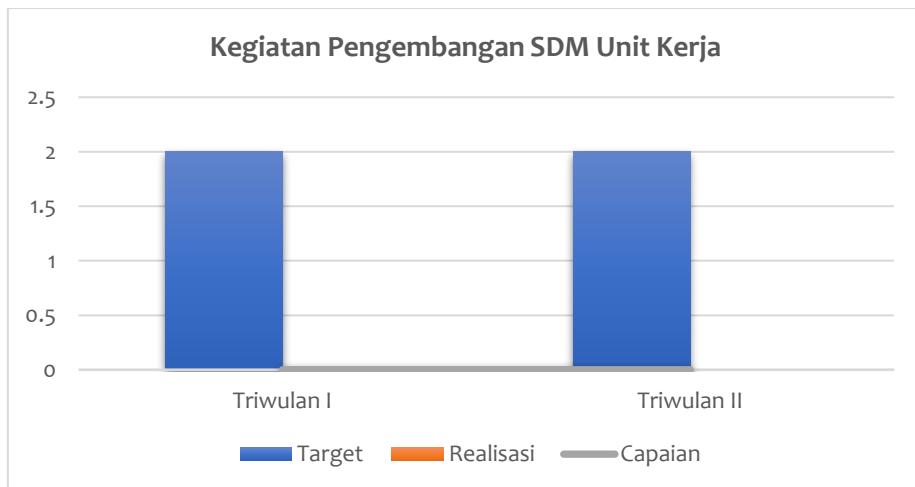
II.2.10.10. IKK 14.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit kerja perhubungan darat mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perhubungan darat. Tujuannya adalah untuk memastikan tersedianya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya dalam menyelenggarakan transportasi darat yang handal.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja.



Gambar II.32 Realisasi IKK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 2 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Tersedianya kelengkapan *database* penggajian;
- Tersedianya rekapitulasi kehadiran pegawai;
- Tersedianya rekapan laporan kinerja bulanan pegawai.

❖ Faktor Kegagalan

- Perubahan data pegawai tidak terkonfirmasi ke PPABP;
- Kendala teknis pada aplikasi penggajian;
- Kekurangan data dukung dapat menunda proses pengusulan pencairan gaji dan tunjangan.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.10 = Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

Realisasi = 0 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{2} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 10.379.956.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 9.304.009.477,- atau mencapai 44,82%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan anggaran terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis bagi pegawai;
2. Mengusulkan anggaran untuk peningkatan motivasi seluruh pegawai;
3. Mengusulkan pencairan gaji dan tunjangan kinerja tepat waktu;
4. Memeriksa kesesuaian dokumen-dokumen pendukung untuk syarat pencarian gaji dan tunjangan kinerja agar tidak terjadi keterlambatan pencairan.

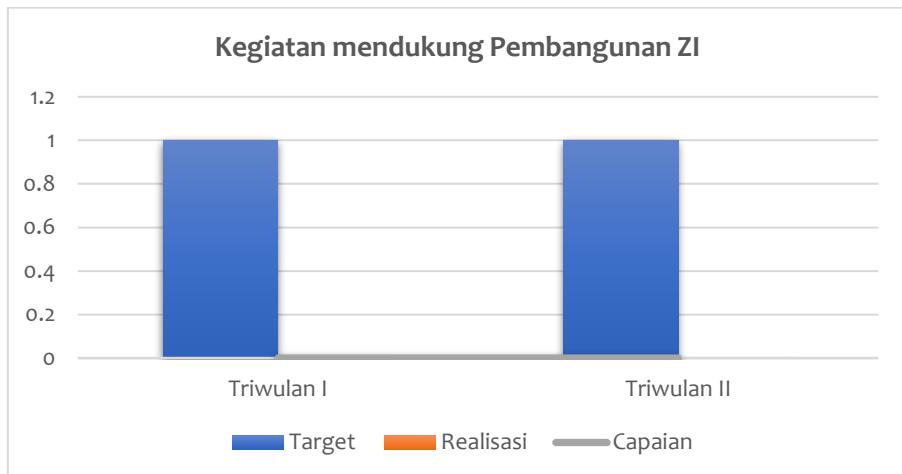
II.2.10.11. IKK 14.11 Kegiatan Mendukung Pembangunan ZI

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah strategi reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia untuk membangun unit kerja yang bebas korupsi (WBK) dan memberikan pelayanan publik yang prima (WBBM). ZI bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas, dengan fokus pada perubahan sistem, sumber daya manusia, dan budaya kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah tindak pidana korupsi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI.



Gambar II.33 Realisasi IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

❖ Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Peresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.2016 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan mendukung Pembangunan ZI tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-

2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Mengelola resistensi dan menumbuhkan komitmen bersama untuk perubahan;
- Memastikan adanya kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Menciptakan pelayanan yang cepat, prima, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

❖ Faktor Kegagalan

- Kurangnya transparansi informasi publik;
- Resistensi pegawai terhadap perubahan;
- Kurangnya komitmen pimpinan;
- Lemahnya implementasi komponen pengungkit dan komponen hasil yang meliputi penataan tatalaksana, manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.11 = Kegiatan mendukung Pembangunan ZI

Realisasi = 0 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan mendukung Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Menerapkan perubahan yang terencana untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik.;

2. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan publik agar lebih efisien dan efektif.;
3. Membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam pengelolaan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
5. Memastikan kinerja unit kerja dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

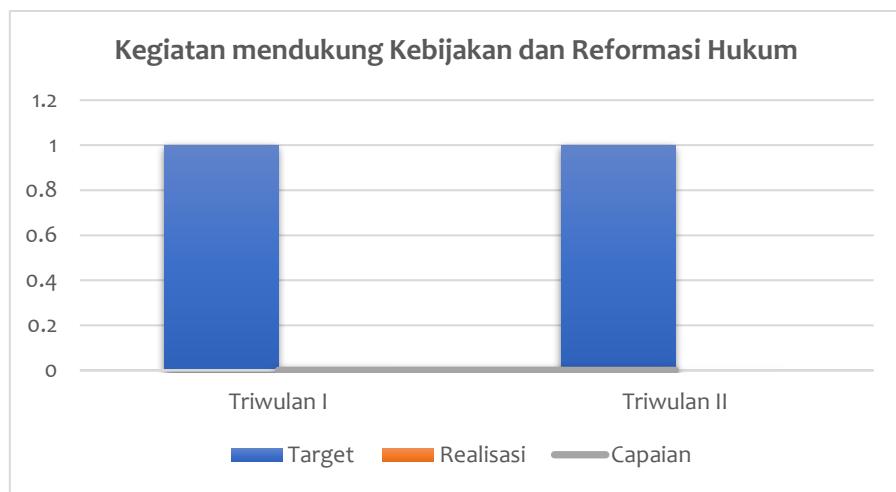
II.2.10.12. IKK 14.12 Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebijakan dan reformasi hukum ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum.



Gambar II.34 Realisasi IKK Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- ❖ Dasar Hukum
 - Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

❖ Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum tahun 2025 diperoleh dari Target draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebanyak 1 kegiatan yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Memasuki Triwulan II tahun 2025 terdapat perubahan terhadap Sasaran Kegiatan berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada draft Renstra yang merujuk hingga akhirnya Revisi I Perjanjian Kinerja. IKK yang mengalami perubahan tentunya merubah target yang ada.

❖ Faktor Keberhasilan

- Penegak hukum yang professional;
- Masyarakat yang sadar dan partisipatif;
- Faktor sosial, budaya, dan ekonomi;
- Sarana dan prasarana pendukung.

❖ Faktor Kegagalan

- Kurangnya Dukungan Publik dan Partisipasi;
- Kepentingan elit yang mendominasi;
- Sifat legalisme yang tidak sesuai;
- Ketidakmampuan dalam menghadapi pluralisme hukum;
- Kualitas penegak hukum yang buruk.

❖ Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

IKK 14.12 = Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum

Realisasi = 0 Kegiatan

❖ Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

❖ Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum Triwulan II Tahun 2025 memiliki target keuangan Triwulan II senilai Rp. 453.001.500,- dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2025 Rp. 100.682.419,- atau mencapai 11,11%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi sejak dini untuk menanamkan sikap patuh pada hukum dan memahami pentingnya supremasi hukum, serta mengadakan diskusi dan seminar untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum melalui perbaikan sistem perekutan, pendidikan, dan pelatihan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui perubahan hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik..

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1. Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 130.466.736.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a.1. Rincian Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025

RM	Rp 104,885,317,000	80.39%
PNBP	Rp 25,581,419,000	19.61%
Total	Rp 130,466,736,000	100%

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp 19,853,910,000	15.22%
Belanja Barang	Rp 56,023,104,000	42.94%
Belanja Modal	Rp 54,589,722,000	41.84%
Total	Rp 130,466,736,000	100%

II.3.1.2. Realokasi Anggaran Tahun 2025

Pada periode Triwulan II tahun 2025 ini BPTD Kelas II Riau tidak ada melaksanakan perubahan / revisi / realokasi anggaran.

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2025

Berikut merupakan data pagu dan realisasi dari tahun 2017 hingga 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14 Perbandingan Pagu & Realisasi

NO	TAHUN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	
		RP.	RP.	RP.	%
1	2017	746.173.000	746.173.000	735.012.888	98,50%
2	2018	154.886.371.000	155.881.123.000	149.097.305.920	95,65%
3	2019	101.436.870.000	92.185.911.000	87.366.439.252	94,77%
4	2020	105.765.540.000	114.521.748.000	113.299.373.799	98,93%
5	2021	226.695.617.000	154.373.472.000	153.524.008.177	99,45%
6	2022	145.564.552.000	146.752.998.000	146.660.930.163	99,94%
7	2023	217.438.999.000	199.220.705.000	200.026.849.087	99,81%
8	2024	167.004.214.000	175.590.910.000	163.496.712.355	93,11%
9.	2025 (Triwulan 2)	130.466.736.000	130.466.736.000	23.378.724.082	17,92%

II.3.2. Realisasi Anggaran TA. 2025

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II tahun 2025 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 23.378.724.082,- atau mencapai 17,92% dari total pagu sebesar Rp. 130.466.736.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Triwulan II TA. 2025

Tabel II.15 Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Pada Periode Triwulan II TA. 2025

KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN II	
			REALISASI	%
403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	130,466,736,000	23,378,724,082	17.92%
02203GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81,693,040,000	12,183,950,811	14.91%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	32,411,878,000	5,780,083,763	17.83%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	22,153,789,000	4,943,059,415	22.31%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	22,551,010,000	892,351,263	3.96%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4,576,363,000	568,456,370	12.42%
02203WA	Program Dukungan Manajemen	48,773,696,000	11,194,773,271	22.95%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	28,919,786,000	2,933,062,268	10.14%
4671	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	19,853,910,000	8,261,711,003	41.61%

II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II TA. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	19,853,910,000	8,261,711,003	41.61%
2	Belanja Barang	56,023,104,000	14,832,013,079	26.47%
3	Belanja Modal	54,589,722,000	285,000,000	0.52%
TOTAL		130,466,736,000	23,378,724,082	17.92%

II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Triwulan II TA. 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Rupiah Murni	104,885,317,000	23,378,724,082	22.29%
2	PNBP	25,581,419,000	0	0.00%
TOTAL		130,466,736,000	23,378,724,082	17.92%

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Sasaran Kegiatan per-Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.16 Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	Triwulan II		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
1	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	100%	64.21%	35.79%
2	SK 3 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi	0.00%	9.25%	-9.25%
3	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	50.00%	33.70%	16.30%
4	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	62.50%	23.57%	38.93%
5	SK 8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	14.68%	15.12%	-0.44%
6	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	0.00%	5.56%	-5.56%
7	SK 10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>	50.00%	9.25%	40.75%
8	SK 11 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	0.00%	0.00%	0.00%
9	SK 12 Meningkatnya Kesadaran & Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan	0.00%	0.00%	0.00%
10	SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran	31.14%	18.98%	12.16%
Rata-Rata		30.83%	17.97%	12.87%

II.3.3.2. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang masih dalam penyesuaian dan berpaku pada arahan pimpinan pusat dan Kementerian keuangan tentunya;
2. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat bahkan level perubahan dalam ruang lingkup banyak matra yang beberapa saling berdampak terhadap administrasi dan wewenang menyebabkan perubahan dan pergantian beberapa pejabat internal BPTD sehingga proses pelaksanakan kegiatan mengalami penyesuaian dokumen yang cukup menyita waktu;
3. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam melakukan revisi DIPA.



BAB III

PENUTUP

Bab III

Penutup

III. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta Pengelolahan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

III.1. Ringkasan Capaian

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 ini terdapat 34 (Tiga Puluh Empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau triwulan II tahun 2025. Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan sebanyak 9 trayek (target 9 trayek) tercapai 100%;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 3) Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 4) Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebanyak 2 trayek (target 2 trayek) tercapai 100%;
 - 5) Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebanyak 0 unit (target 1 unit) tercapai 0%;
 - 6) Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi sebanyak 3 lokasi (target 3 lokasi) tercapai 100%;
 - 7) Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM terealisasi sebanyak 3 lokasi (target 3 lokasi) tercapai 100%;
 - 8) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
 - 9) Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebanyak 2 lokasi (target 9 lokasi) tercapai 22%;
 - 10) Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebanyak 2 lokasi (target 28 lokasi) tercapai 7%;
 - 11) Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 12) Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang dan penegakkan hukum terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 13) Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 14) Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 15) Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 16) Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
 - 17) Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;

- 18) Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
- 19) Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi sebanyak 0 unit (target 1.378 unit) tercapai 0%;
- 20) Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi sebanyak 0 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 0%;
- 21) Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 orang (target 200 orang) tercapai 0%;
- 22) Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 orang (target 200 orang) tercapai 0%;
- 23) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 4 kegiatan) tercapai 50%;
- 24) Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 18 dokumen (target 34 dokumen) tercapai 52,94%;
- 25) Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebanyak 8 kegiatan (target 15 kegiatan) tercapai 53,33%;
- 26) Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 5 kegiatan (target 10 kegiatan) tercapai 50%;
- 27) Tindak Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebanyak 0 dokumen (target 2 dokumen) tercapai 0%;
- 28) Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 137 kegiatan (target 270 kegiatan) tercapai 50,74%;
- 29) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
- 30) Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebanyak 4 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 66,67%;
- 31) Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 50%;
- 32) Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 0%;
- 33) Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;
- 34) Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi hukum terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 0%;

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan meningkatkan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau; Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*; Melaksanakan evaluasi berkala dan substansial dalam merencanakan, mempersiapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				T	R	C			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SK 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan					100%			
1	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	9	9	9	100%	TERCAPAI	Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berjalan
	SK 3 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi					0%			
2	IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut
	SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan					50%			
3	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	Unit	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Anggaran kegiatan fisik diblokir, menunggu arahan lebih lanjut
4	IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2	2	2	100%	TERCAPAI	Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berjalan
	SK 7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					63%			
5	IKK 7.1	Jumlah Terminal tipe A yang Ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	Unit	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Anggaran kegiatan fisik diblokir, menunggu arahan lebih lanjut
									Prasarana JSDP

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
				T	R	C				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6	IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	3	3	3	100%	TERCAPAI	Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berjalan	Prasarana JSDP
7	IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai PM	Lokasi	3	3	3	100%	TERCAPAI	Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berjalan	Prasarana JSDP
8	IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	2	1	50%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was
	SK 8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP					14.68%			
9	IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	9	9	2	22%	BELUM TERCAPAI	Berdasarkan IM 35 bahwasanya ada peralihan pelabuhan dari Ditjen Hubdat kepada Ditjen Hubla	Prasarana JSDP
10	IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	28	28	2	7%	BELUM TERCAPAI	Berdasarkan IM 35 bahwasanya ada peralihan pelabuhan dari Ditjen Hubdat kepada Ditjen Hubla	Prasarana JSDP
	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					0%			
11	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Sarana & AJSDP
12	IKK 9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang dan Penegakkan Hukum	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was
13	IKK 9.3	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Sarana & AJSDP
14	IKK 9.4	Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				T	R	C			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was
16	IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was
SK 10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>					50%			
17	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berjalan	Sarana & AJSDP
18	IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Sarana & AJSDP
SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan					0%			
19	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Unit	1378	1378	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was
20	IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman	Lokasi	4	4	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	LLJSDP & Was
SK 12	Meningkatnya Kesadaran & <i>Attitude</i> Pengguna Jalan Berkeselamatan					0%			
21	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	200	200	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Sarana & AJSDP

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
				T	R	C				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
22	IKK 12.2	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	Orang	200	200	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Sarana & AJSDP
	SK14	Meningkatnya Layanan Perkantoran				31.14%				
23	IKK 14.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	2	50%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
24	IKK 14.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	34	34	18	52.94%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
25	IKK 14.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	15	15	8	53.33%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
26	IKK 14.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	10	10	5	50%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
27	IKK 14.5	Tindak Lanjut Audit/Pemeriksaan Rekomendasi	Dokumen	2	2	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
28	IKK 14.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	270	270	13 7	50.74%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
29	IKK 14.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
30	IKK 14.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	6	6	4	66.67%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
31	IKK 14.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2	2	1	50%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				T	R	C			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	IKK 14.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
33	IKK 14.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha
34	IKK 14.12 Kegiatan mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kebijakan Efisiensi membatasi banyak kegiatan, Masih menunggu arahan lebih lanjut	Subbag Tata Usaha